ISSN 2962-4177

Lensa Pembangunan

BULETIN

EDISI 2 APRIL - JUNI 2025

Menuju

PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF, ADAPTIF DAN INKLUSIF



ISSN 2962-4177



OFFICIAL SOCIAL MEDIA

BAPPEDA DAN LITBANG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

bappedalitbang_kaltara

bappedadanlitbangprov_kalimantanutara

bappeda&litbangprovkaltara

bappedalitbang_kaltaraprov.go.id

TAJUK



Seraya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kehendak-Nya, Buletin ini bisa tersaji di hadapan Anda, para pembaca budiman. Di edisi kedua tahun 2025, dengan semangat baru, Buletin Lensa Pembangunan akan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar perencanaan dan inovasi daerah di Kalimantan Utara serta berbagai informasi lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

Edisi kali ini Lensa Pembangunan hadir dengan topik utama Pembangunan Yang Terbuka dan Partisipatif : Menuju Pemerintahan Yang Responsif, Adaptif dan Inklusif. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berupaya mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan merangkul bersama dan memastikan keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam proses tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Tidak ketinggalan, redaksi akan menyajikan beberapa liputan kegiatan seperti Musrenbang RPJMD 2025 - 2029, Konreg PDRB Kasulampua, dan Sosialisasi Stunting Untuk Tenaga Kependidikan.

Jangan lewatkan pula artikel inovasi derah serta rubrik lingkungan yang akan membuka wawasan baru bagi pembaca sekalian.

Akhir kata, semoga buletin ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.
Selamat membaca.



Mochamad Sarkawi, S.Hut.M.Eng
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LENSA PEMBANGUNAN

PENGARAH
Gubernur Kalimantan Utara
Wakil Gubernur Kalimantan Utara

PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

PENASEHAT REDAKSI
Kepala Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara

PEMIMPIN REDAKSI
Kepala Bidang
Penelitian dan Pengembangan

EDITOR
Linda Marlisa

PENULIS ARTIKEL
Tim Penulis

DESAIN GRAFIS
Ady Setiawan
Cristove Dismond

FOTOGRAFER
Jeri Markelius

SEKRETARIAT
Muhammad Roja Fajari
Dewi Erisna Utami

ALAMAT REDAKSI
Jl. Agathis, Gedung PUPR-PERKIM Lt. 4
Tanjung Selor - Kalimantan Utara



DAFTAR ISI



1 TOPIK UTAMA

PEMBANGUNAN YANG TERBUKA DAN PARTISIPATIF:
MENUJU PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF, ADAPTIF DAN INKLUSIF 6

KALTARA MENUJU KAWASAN RAMAH LANSIA 16
STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN IBU TUNGGAL DI KALIMANTAN UTARA 22

2 LIPUTAN KEGIATAN

MUSRENBANG RPJMD 2025-2029 : KALTARA MANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN 30
SOSIALISASI STUNTING UNTUK TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 32
FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENSTRA PD 2025-2029 34

RPKD KALTARA DAN IKHTIAR MENGIKIS KEMISKINAN 36
PERINGATI HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA 2025: HENTIKAN POLUSI PLASTIK 38
VERIFIKASI INOVASI DAERAH PROVINSI KALTARA TAHUN 2025 39
MERAJUT ASA LEWAT RAD SDGS 2025-2029 40

3 SEKILAS INFO

INFORMASI SINGKAT KEGIATAN BAPPEDA DAN LITBANG 52

4 LINGKUNGAN

MENAKAR JASA LINGKUNGAN MANGROVE UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN HIJAU 54

5 INOVASI DAERAH

ECO-CHIC: RAYAKAN KECANTIKAN ALAM DALAM SETIAP HELAINYA 56
BIORHYTM: MONITORING KESEHATAN JANTUNG 57
TRANFORMASI LAYANAN MAIN HATI PERPUSTAKAAN DAERAH KEPENDAYAN TARAKAN 58

6 POTRET RUANG

PROLIFERASI WANGI KOPI : MODERNITAS, EKONOMI, RUANG SOSIAL BARU DAN JEJAK EKOLOGIS 60

7 JELAJAH

BALOY MAYO ADAT TIDUNG 64

8 MUATAN LOKAL

JERUNUN SI ANTU DANUM 66

PEMBANGUNAN YANG TERBUKA DAN PARTISIPATIF: MENUJU PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF, ADAPTIF DAN INKLUSIF

Pembangunan bisa disebut sebagai proses perubahan yang dirancang secara sadar supaya kehidupan masyarakat jadi lebih baik. Pemerintah berusaha menampung berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang jumlahnya banyak dan beragam. Karena itu, pembangunan harus dijalankan dengan memperhatikan mana yang jadi priroitas dan seberapa besar kemampuan sumber daya yang tersedia. Tujuannya jelas: meningkatkan kesejahteraan bersama.

Tapi Pembangunan tidak bisa dikerjakan pemerintah sendirian. Masyarakat perlu ikut terlibat, khususnya sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, masyarakat tahu program dan kegiatan apa saja yang akan dijalankan, sekaligus bisa ikut mendorong, mengawasi, bahkan menjadi bagian dari pelaksanannya. Keterlibatan ini menjadi pondasi penting untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif dan adaptif.

Pemerintahan yang responsif berarti mampu mendengar, memahami dan menanggapi kebutuhan serta aspirasi Masyarakat dengan cepat.



Sementara pemerintahan yang adaptif adalah yang mau belajar, berubah dan berinovasi sesuai perkembangan zaman. Jadi bukan hanya reaktif, tapi juga proaktif dalam menghadapi tantangan di era modernisasi dan digitalisasi seperti sekarang.

Agar bisa benar-benar responsif dan adaptif, pemerintah butuh dasar hukum yang kuat. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Caranya dengan meningkatkan pelayanan, memperkuat peran masyarakat, mendorong pemberdayaan dan meningkatkan daya saing daerah, sambil tetap berpegang pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah dalam bingkai NKRI.

Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Aturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan, mulai dari rencana jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Prosesnya dilakukan bertahap, dimulai dari tingkat desa atau kelurahan, lalu naik ke tingkat yang lebih tinggi.

Saat ini, Kalimantan Utara dan juga daerah lain di Indonesia sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2029, setelah ditetapkannya presiden dan wakil presiden terpilih. Di tingkat provinsi, penyusunan RPJMD 2025-2029 juga berjalan setelah



gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik. Sebelum RPJMD resmi ditetapkan, Pemerintah Provinsi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang harus dilaksanakan paling lambat dua bulan setelah pelantikan kepala daerah.

Musrenbang bertujuan menjaring aspirasi, saran dan masukan dari berbagai pihak. Hasilnya digunakan untuk menyempurnakan rancangan RPJMD agar sesuai dengan arah pembangunan nasional sekaligus priroitas daerah. Forum ini juga menjadi ruang untuk membangunan kesepahaman terkait visi, misi, sasaran, strategi dan program prioritas daerah selama lima tahun ke depan.

Sebagai provinsi dengan potensi sumber daya alam besar, Kalimantan Utara kini berupaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu caranya adalah inovasi dan kolaborasi, termasuk merangkul Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Di Kalimantan Utara, kelompok ini terwadahi dalam Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) yang beranggotakan perwakilan dari kelompok anak, disabilitas, adat, lansia hingga kelompok rentan. JMS diharapkan bisa menjadi saluran suara bagi kelompok yang selama ini kesulitan menyampaikan aspirasi karena terbatasnya akses dan informasi.

Peran JMS ini erat kaitannya dengan prinsip inklusif. Sederhananya, inklusi berasal dari kata *"include"* yang berarti mengikutsertakan. Jadi, inklusif berarti melibatkan semua orang tanpa terkecuali. Bukan hanya mengutamakan kelompok tertentu, tapi memastikan semua bisa terlibat, termasuk kelompok marginal yang sering menghadapi diskriminasi atau kesenjangan.

Untuk memperkuat prinsip ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menggelar Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif MENTARI KALTARA





(Menyerap Aspirasi untuk SETARA dan INKLUSI). Forum ini pertama kali dilaksanakan pada 20 Maret 2025 di Gedung Gadis, Tanjung Selor. Tujuannya jelas: memastikan pembangunan benar-benar bermanfaat bagi semua, termasuk anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya.

Lewat forum MENTARI Kaltara, para pemangku kepentingan diajak lebih sadar soal pentingnya inklusi, sekaligus menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan ini membantu Kalimantan Utara merancang kebijakan yang lebih responsif, adaptif, relevan, dan adil. Artinya, pembangunan inklusif bukan hanya komitmen di atas kertas, tapi agenda nyata yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan.

Partisipasi aktif dari enam kelompok JMS juga menegaskan pentingnya suara masyarakat dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. Masukan yang diberikan tidak hanya memperkaya perspektif pemerintah, tapi juga membantu menemukan celah layanan yang perlu diperbaiki agar kebijakan bisa lebih tepat sasaran. Hal ini juga memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah.

Untuk mendukung peran JMS, Pemprov Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang bekerja sama dengan SKALA, program kerja sama Indonesia dan Australia. Fokusnya adalah memberikan bimbingan teknis soal literasi data, khususnya terkait Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Anggaran Responsif Gender (ARG). Dengan keterampilan ini, JMS bisa menganalisis data, menemukan kesenjangan layanan, serta menyusun strategi advokasi berbasis data agar kebijakan daerah lebih relevan dan inklusif.

Partisipasi masyarakat memang jadi kunci. Pemerintahan yang responsif dan adaptif hanya bisa terwujud kalau masyarakat merasa dilibatkan dan didengar. Ketika masyarakat punya ruang untuk menyampaikan aspirasinya, mereka cenderung lebih mendukung kebijakan yang diambil. Hasilnya adalah sinergi positif dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Selain lewat Forum MENTARI Kaltara, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi lain, salah satunya lewat Kerja Sama Multipihak (MSP). Misalnya pada tahun 2024, Kalimantan Utara melaksanakan

MSP bersama organisasi non pemerintah, seperti Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL) di Kabupaten Bulungan. Fokus utamanya adalah menurunkan angka stunting di Bulungan dan Tana Tidung. Program ini dijalankan dengan dukungan kerja sama antara Indonesia dan Jerman melalui GIZ. Semua upaya ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi masa depan, pemerintah memang harus bergerak menuju tata kelola yang responsif, adaptif, dan inklusif.

Tantangan seperti ketimpangan sosial, kurangnya transparansi, dan diskriminasi hanya bisa diatasi dengan keterbukaan, partisipasi, penguatan kapasitas, dan keberpihakan pada semua kelompok. Jika prinsip-prinsip ini dijalankan, pembangunan bisa menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara adil oleh semua warga. (CTY)

Pemprov. Kaltara berupaya mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan merangkul bersama dan memastikan keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam proses tahapan perencanaan pembangunan daerah.





DARI ASPIRASI KE PROSES PEMBANGUNAN: MENTARI KALTARA MENYINARI HARAPAN KELOMPOK RENTAN

[Penulis : Zunea Farizka Azyza Harro Uasni [1]]

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mengembangkan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inklusif. Salah satu inisiatif unggulan yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan ini adalah Musrenbang Inklusif melalui Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif — Mentari Kaltara.

Forum ini menjadi wadah strategis bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Mentari Kaltara (**Men**yerap Aspirasi untuk Se**tara** dan **I**nklusif) diharapkan menjadi forum yang mendorong partisipasi bermakna dari masyarakat sipil dan kelompok rentan, sehingga tercipta kesetaraan dan pembangunan yang semakin inklusif.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi landasan dari lahirnya forum ini, di mana partisipasi publik menjadi elemen penting yang harus diupayakan pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah, mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), guna memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sudah mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Proses menuju pelembagaan forum ini telah melalui perjalanan yang panjang. Tahun 2024, diadakan uji coba Musrenbang Inklusif–Mentari Kaltara, yang menjadi tonggak awal pelibatan langsung masyarakat sipil dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara inklusif. Uji coba ini menjadi pembelajaran berharga, baik bagi pemerintah maupun Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) yang baru berkolaborasi saat itu, tentang bagaimana menjamin partisipasi yang bermakna dari semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini kurang terwakili dalam forum formal perencanaan.

Dari uji coba tersebut, lahir kesadaran bersama akan pentingnya mekanisme yang mampu merajut keberagaman aspirasi sekaligus mengawali arah pembangunan agar lebih inklusif. Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif di bawah payung Mentari Kaltara menjadi lebih terstruktur dan





Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara merupakan bentuk keberpihakan Pemprov. Kaltara kepada kelompok masyarakat rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok masyarakat lain yang terpinggirkan

Ingkong Ala

Wakil Gubernur
Kalimantan Utara

terarah di tahun 2025. Pelembagaan Musrenbang Inklusif semakin menguat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara Nomor 100.3/444/BAPP-LIT.3/III/2025 tentang Petunjuk Teknis Musrenbang Inklusif Kalimantan Utara (Mentari Kaltara).

Pemerintah Provinsi kemudian menunjukkan komitmen nyata melalui Tim Pelaksana dan Fasilitator yang mendukung pelaksanaan Musrenbang Inklusif di tingkat provinsi. Dalam penyelenggaran musrenbang inklusif tersebut, buku Juknis Mentari Kaltara diserahkan secara resmi kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan JMS.

Keterlibatan kelompok rentan semakin komprehensif, mencakup perwakilan kelompok Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, Adat, Lansia, serta Kelompok Rentan Lainnya. Arah JMS adalah memastikan setiap kelompok dapat menyusun dan menyampaikan masukan yang relevan untuk dimasukkan dalam Musrenbang Inklusif – Mentari Kaltara.

Proses penjaringan aspirasi dilakukan melalui diskusi kelompok, lokakarya tematik, hingga pertemuan lintas sektor, dengan tujuan merumuskan prioritas pembangunan yang adil dan setara. Keterlibatan pemerintah dalam mendampingi JMS juga layak diapresiasi, terlihat dari sinergi konsisten beberapa



Capaian forum pada tahun ini tidak hanya terlihat dari jumlah aspirasi yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhan mereka secara terstruktur. Adapun perkembangan jumlah usulan dari JMS Kaltara dapat diuraikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Jumlah Usulan JMS

Tahun	Kelompok	Jumlah Usulan
2024	Anak	10
	Perempuan	5
	Disabilitas	13
	Rentan	5
Total		33 (usulan)
2025	Anak	12
	Perempuan	5
	Disabilitas	20
	Lansia	6
	Masyarakat Adat	15
	Rentan	13
Total		71 (usulan)

Masukan-masukan yang dihasilkan mencakup berbagai isu, mulai dari isu tentang pekerja usia anak, partisipasi dan pemberdayaan perempuan pada proses pembangunan, infrastruktur ramah disabilitas termasuk kemudahan akses dalam berbagai aspek, penguatan hak dan partisipasi masyarakat adat, dukungan terhadap kebijakan yang berpihak pada lansia hingga fokus sosial dan pemberdayaan pada kelompok rentan lainnya (fakir miskin).

Perkembangan usulan difokuskan pada penentuan prioritas sesuai alur perencanaan daerah. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, menegaskan bahwa Musrenbang Inklusif bukan sekadar forum pengusulan, tetapi juga sarana untuk menyusun prioritas berdasarkan hasil forum perangkat daerah dan tahapan perencanaan sebelumnya. Aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi prioritas dalam musrenbang dan terus dikawal hingga masuk ke dokumen perencanaan perangkat daerah, sehingga dapat tercantum dalam RKPD Perubahan 2025 dan RKPD Murni 2026.

Usulan diproses melalui forum perangkat daerah dan diarahkan agar dapat masuk ke RKPD Perubahan 2025 atau RKPD 2026. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan usulan spesifik dan selaras dengan renstra OPD.

Upaya mendorong Musrenbang Inklusif tersebut didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. Dukungan ini mendorong tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan inklusif serta memperkuat model kolaborasi JMS, kapasitas advokasi JMS, mendukung penyusunan Petunjuk Teknis, dan memastikan keberlanjutan mekanisme Musrenbang Inklusif.

Penguatan di Tingkat Kabupaten

Kabupaten Bulungan sebagai Kabupaten yang pertama kali yang memodifikasi model Musrenbang Mentari Kaltara di tingkat Kabupaten melalui pembentukan Jaringan Aspirasi Rakyat Inklusif (JARI). Inovasi tersebut lahir setelah diterbitkannya SE Gubernur Kalimantan Utara Nomor 000.7.2.2/0033/ BAPP-LIT/GUB) yang menginstruksikan pelaksanaan Musrenbang Inklusif tematik di tingkat Kabupaten/Kota. Sebuah upaya yang mendorong penerapan pendekatan inklusif yang lebih adaptif dengan konteks daerah.

Mentari Kaltara Layaknya Cahaya yang Menyinari Harapan Masyarakat

Melalui Musrenbang Inklusif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama seluruh mitra pembangunan berharap dapat merajut beragam aspirasi menjadi satu arah kebijakan yang mencerahkan masa depan pembangunan daerah. Sebuah pembangunan yang inklusif, adil, dan berpihak kepada semua warga tanpa terkecuali. Ke depan, keberhasilan forum ini akan diukur dari jumlah aspirasi yang benar-benar terwujud menjadi program nyata.

[1] Koordinator GEDSI Provinsi SKALA Kaltara



INFRASTRUKTUR INKLUSIF : PEMBANGUNAN YANG MERANGKUL SEMUA

[Penulis : Retno Sawitri Listyabratarini[1]]

Pernahkah kita melihat trotoar yang tinggi tanpa jalur landai, sehingga menyulitkan pengguna kursi roda? Atau pelabuhan yang besar, tapi tanpa informasi visual maupun suara, sehingga membingungkan bagi teman-teman tunanetra dan tuli? Apakah ketika kita mendengar kata infrastruktur, pikiran kita sering langsung tertuju pada jalan tol yang mulus, bandara megah, atau gedung-gedung pencakar langit.

Namun, pernahkah kita bertanya: siapa saja yang benar-benar bisa menikmati infrastruktur itu? Apakah hanya mereka yang sehat, kuat, dan berada di kota besar? Bagaimana dengan lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat di pedalaman, atau anak-anak di pelosok desa?

Inilah contoh kecil mengapa kita perlu berbicara tentang infrastruktur inklusif. Inklusif pada dasarnya berarti terbuka, melibatkan, dan memberi ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Inklusif berarti merangkul semua, tidak meninggalkan siapa pun. Mengakui keberagaman dan memastikan semua orang bisa ikut serta, tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang, kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, agama, gender, atau lainnya.

Infrastruktur inklusif artinya pembangunan yang ramah untuk semua orang, tidak peduli usia, kondisi fisik, atau tempat tinggalnya. Jadi, bukan hanya mereka yang sehat, muda, dan tinggal di kota besar yang bisa menikmatinya, tetapi juga anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat di desa-desa terpencil.

Kenapa Penting ?

Akses untuk semua, Keadilan Sosial. Bayangkan kalau transportasi publik bisa digunakan dengan mudah oleh siapa saja, tentu mobilitas jadi lebih lancar dan nyaman. Konstitusi menjamin kesetaraan akses bagi semua warga negara. Infrastruktur eksklusif berarti ada yang tertinggal. **Mengurangi kesenjangan.** Jangan sampai pembangunan hanya terkonsentrasi di kota, sementara warga desa atau wilayah perbatasan kesulitan jalan layak atau akses internet. **Meningkatkan kemandirian.** Dengan infrastruktur yang inklusif, kelompok rentan tidak selalu harus bergantung pada orang lain untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Wujud Nyatanya Bisa Seperti Apa?

Infrastruktur inklusif adalah fasilitas publik yang ramah bagi setiap lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Trotoar dengan jalur pemandu dan ramp untuk kursi roda. Angkutan umum dengan kursi prioritas, informasi suara, dan layar digital. Gedung pelayanan publik yang menyediakan lift, toilet ramah disabilitas, dan ruang laktasi. Internet yang menjangkau hingga pelosok desa, agar semua bisa ikut terhubung. Taman kota yang nyaman bukan hanya untuk olahraga, tapi juga untuk anak-anak dan lansia.

Pemerintah memegang peran sentral dan multifaset dalam mewujudkan infrastruktur inklusif di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lanjut usia. Pemerintah sejatinya sudah meletakkan dasar. Pemerintah menetapkan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai payung nasional hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yang kemudian diikuti oleh sejumlah PP teknis seperti Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 untuk aksesibilitas permukiman dan layanan publik, serta Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang perencanaan dan evaluasi hak penyandang disabilitas.

Selain itu, Kemenko PMK mendorong pembentukan *task force* guna memastikan infrastruktur tangguh dan inklusif yang melindungi kelompok rentan dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Lalu, regulasi apa saja yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mendukung penerapan Infrastruktur Inklusif di Indonesia? Berikut kami coba rangkumkan:

Regulasi	Penerapan Utama
UUD 1945 Pasal 27H (2)	Penegasasn bahwa **setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus** untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Mewajibkan penyelenggara publik menerapkan prinsip layanan yang **adil, tidak diskriminatif, dan menyediakan fasilitas serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan** seperti penyandang disabilitas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	• Pasal 2 huruf h: mengakui hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas, • Pasal 5 ayat (1) huruf m: mengatur akses terhadap fasilitas publik, • Pasal 18–20: menjelaskan hak atas aksesibilitas, akomodasi yang layak dalam layanan publik, dan perlindungan dari bencana • Pasal 85–94: mewajibkan pemerintah dan daerah menyediakan aksesibilitas dalam layanan budaya, wisata, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan melalui infrastruktur yang inklusif



Regulasi	Penerapan Utama
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Menetapkan standar **aksesibilitas bangunan gedung** agar ramah penyandang disabilitas
PP No. 52 Tahun 2019	penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas
PP No. 70 Tahun 2019	Mengenai **perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi** terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas
PP No. 13 Tahun 2020	Menekankan **akomodasi yang memadai** bagi peserta didik penyandang disabilitas dalam pendidikan
PP No. 39 Tahun 2020	Mengatur akomodasi layak dalam proses peradilan
PP No. 42 Tahun 2020	Mengatur tentang **aksesibilitas terhadap permukiman, layanan publik, dan perlindungan dari bencana** bagi penyandang disabilitas
PP No. 60 Tahun 2020	Mengenai layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan
PP No. 75 Tahun 2020	Mengatur layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas
TRANSPORTASI	
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	• **Pasal 26**: Menyatakan hak penyandang disabilitas atas akses mandiri terhadap fasilitas publik termasuk sistem transportasi. • **Pasal 98 ayat (1)**: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan sistem transportasi umum yang mudah diakses. • **Pasal 104**: Mendorong pengembangan moda transportasi yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2019	• Pasal 68: Kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan layanan transportasi yang mudah diakses dan ramah disabilitas, baik oleh pemerintah, pemda, maupun swasta. • Pasal 69: Penetapan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik (darat, laut, udara) yang inklusif.
	• Pasal 71–75: Penyusunan dan pelaksanaan pelatihan bagi petugas transportasi serta penyediaan sistem komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan disabilitas.
Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 98 Tahun 2017	Mewajibkan penyedia jasa transportasi publik untuk menyediakan fasilitas inklusif, seperti: • Ramp, lift, ubin penuntun, pintu lebar, drop zone, loket tiket dan ruang tunggu aksesibel. • Sistem informasi audio dan visual, toilet khusus, kursi prioritas, hingga petugas terlatih dan layanan tanpa biaya tambahan.
Permenhub No. KM 31 Tahun 2005 (SNI 03-7049-2004)	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7049-2004 mengenai Perancangan Fasilitas bagi Pengguna Khusus di Bandar Udara sebagai Standar Wajib
Permenhub No. 98/2013	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
Permenhub No. 117/2018	**Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek**. Mengatur layanan transportasi yang tidak memiliki lintasan dan waktu tetap, seperti angkutan sewa dan carter
Permenhub No. 15/2019	**Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek**. Mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan layanan transportasi orang menggunakan kendaraan umum yang memiliki rute tetap dan terjadwal.
Permenhub No. 62/2019	**Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan**. Mengatur persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan penyeberangan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan
Permenhub No. 63/2019	Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api

[1] Penelaah Teknis Kebijakan, Bappeda dan Litbang Kaltara

Regulasi	Penerapan Utama
Permenhub No. 30/2021	Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara. Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan dan mengatur pelayanan bagi pengguna jasa angkutan udara, terutama penumpang kelas ekonomi dalam negeri
TELEKOMUNIKASI	
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Kerangka hukum dasar bagi penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya **Pasal 5** dan **Pasal 24 ayat (2)**	menggambarkan kewajiban agar **informasi dan komunikasi publik mudah diakses oleh penyandang disabilitas**
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000	**Penyelenggaraan Telekomunikasi** – menindaklanjuti implementasi UU 36/1999
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	memperbarui regulasi sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran dalam konteks industri
Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2007	Mengatur tentang **Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal (USO) Telekomunikasi**, yakni layanan dasar telekomunikasi yang wajib tersedia di daerah terpencil atau tidak layak secara ekonomis
Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 (pasal 21–30)	mengatur pemanfaatan infrastruktur pasif secara **adil, transparan, dan non-diskriminatif**, termasuk persyaratan tarif, kesetaraan akses bagi penyelenggara, dan jaminan kualitas layanan
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2018, diubah oleh **Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2023**	membentuk dan menyempurnakan struktur organisasi **Bakti (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi)** di lingkungan Kominfo, yang bertugas mengurusi aksesibilitas telekomunikasi dan informasi untuk publik

Secara keseluruhan, landasan hukum ini membentuk kerangka nasional untuk mendorong infrastruktur yang inklusif dan aksesibel baik dalam pembangunan fisik maupun layanan publik. Kemudian, ada Badan Standardisasi Nasional Aksesibilitas (BSNPI) di bawah Kementerian PUPR yang bertugas mengembangkan pedoman teknis dan standar aksesibilitas untuk berbagai sektor—seperti transportasi, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Instrumen teknis dan audit atas penerapan aksesibilitas dalam berbagai fasilitas.

Perluasan pedoman teknis juga diwujudkan lewat revisi Surat Edaran dan standar teknis trotoar agar lebih ramah disabilitas, misalnya dimensi yang lebih inklusif serta fasilitas seperti ubin pemandu dan ramp trotoar.

Sektor telekomunikasi sudah memiliki regulator dan dasar hukum yang cukup kuat—mulai dari pelayanan universal hingga tata kelola teknis. Namun, untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, kebijakan lebih mengarah pada pengembangan standar laman web dan layanan komunikasi publik yang inklusif, serta pembentukan badan seperti BAKTI untuk mengawal akses ini. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah merancang peraturan yang bersifat inklusif menunjukkan langkah ke arah regulasi yang lebih spesifik dan fokus pada kebutuhan aksesibilitas.

Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengubah regulasi itu menjadi kenyataan di lapangan. Jangan sampai infrastruktur hanya "ramah disabilitas" di dokumen, tetapi di lapangan trotoar dipasang ubin pemandu yang justru berakhir buntu di tiang listrik. Atau halte bus megah, tetapi tidak ada ramp sehingga kursi roda tak bisa naik.

Mengubah cara pandang. Kuncinya adalah menggeser paradigma: dari sekadar "membangun" ke "membangun yang bisa digunakan semua orang". Dari sekadar mengejar *"output"* (berapa kilometer jalan) ke *"outcome"* (siapa yang bisa benar-benar memanfaatkan jalan itu). Membangun infrastruktur inklusif bukan hanya tugas pemerintah.

Komunitas, swasta, dan warga juga bisa ikut berperan. Misalnya, komunitas bisa mendorong agar ruang publik di lingkungannya ramah untuk semua. Atau warga bisa aktif menyuarakan kebutuhan nyata kelompok rentan agar masuk dalam perencanaan pembangunan. Karena pada akhirnya, infrastruktur inklusif bukan sekadar beton, baja, dan aspal. Ia adalah simbol kepedulian, jembatan keadilan sosial: bahwa pembangunan ini hadir untuk merangkul semua orang, tanpa terkecuali.

> **Pemerintah memegang peran sentral dan multifaset dalam mewujudkan infrastruktur inklusif di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lanjut usia.**



KALTARA MENUJU KAWASAN RAMAH LANSIA

[Penulis : Muhammad Zulfunun [1]]

Menyediakan standar pelayanan minimum bagi lansia di semua lini bukanlah semata kebutuhan hari ini, tetapi juga investasi untuk masa depan. Data menunjukkan, setiap tahun jumlah lansia terus bertambah. Mereka yang bahkan kini masih bermain riang sebagai balita, suatu hari akan menapaki usia senja, dan saat itulah mereka akan membutuhkan pelayanan yang ramah lansia. Merancang lingkungan dan kebijakan yang berpihak pada lansia berarti kita sedang menyiapkan dunia yang layak, bukan hanya untuk mereka yang telah menua sekarang, tetapi juga untuk diri kita sendiri dan generasi setelah kita.

Kenapa Perhatian terhadap Lansia Penting

Coba bayangkan, suatu sore Kita duduk santai sambil menggulir layar *smartphone.* Tanpa sengaja, kita dapat menemukan data demografi terbaru tentang Indonesia. Angkanya cukup mencuri perhatian: ternyata hampir 12% penduduk kita kini berusia 60 tahun ke atas—sekitar 29 juta jiwa (BPS 2023; Kemenkes 2024; DataIndonesia 2025). Kita mungkin berpikir, “Wah, banyak juga yah!. Bisa jadi orang tua kita, tetangga, atau suatu saat nanti—kita sendiri—akan masuk ke angka ini.”



Fakta itu membuat kita menyadari bahwa Indonesia sudah memasuki fase populasi menua. Lansia bukan lagi kelompok kecil di sudut statistik, melainkan bagian besar dan penting dari masyarakat kita. Dan menariknya, kita sedang berada di sebuah titik bersejarah: era yang disebut para ahli sebagai bonus demografi kedua. Jika bonus demografi pertama diwarnai oleh dominasi penduduk usia produktif yang menjadi tulang punggung pembangunan, maka bonus kedua ini justru ditopang oleh para lansia yang, meski berusia lanjut, tetap mampu produktif, mandiri, dan memberi kontribusi berharga (Heryanah 2015; Rapih 2019 dalam Hakim 2020).

Angkanya terus bergerak. Pada 2023, 11,75% penduduk Indonesia adalah lansia—setara 22,6 juta jiwa (BPS 2023; Komnas Perempuan 2024). Setahun kemudian, persentasenya naik menjadi 12%, atau 29 juta jiwa (Kemenko PMK 2025; Kemenkes 2024). Proyeksi 2025 menunjukkan lonjakan hingga 33,7 juta orang atau 11,8% total penduduk (BPS 2025;

KBR 2025). Dan puncaknya, pada 2045—tahun yang kita sebut sebagai Indonesia Emas—diperkirakan 1 dari 5 penduduk adalah lansia, jumlahnya sekitar 65 juta orang (Kemenko PMK 2025; KBR 2025). Namun, persoalannya bukan sekadar jumlah. Rasio ketergantungan lansia—yakni berapa banyak orang produktif yang menopang kehidupan seorang lansia—juga meningkat. Pada 2024, dari setiap 100 orang usia produktif, ada 17 yang 'menanggung' satu lansia (DataIndonesia 2025). Memang, usia harapan hidup kita semakin panjang, tetapi *healthy life expectancy* atau usia harapan hidup sehat masih tertinggal di belakang *life expectancy.* Itu berarti ada tahun-tahun yang dilewati lansia dalam kondisi kesehatan yang kurang optimal.

Inilah titik krusialnya. Tanpa persiapan yang matang, pertambahan jumlah lansia bisa menjadi beban sosial-ekonomi. Sebaliknya, jika kita membangun lingkungan yang ramah lansia—dengan fasilitas kesehatan terjangkau, kesempatan beraktivitas, dan dukungan sosial yang menjaga martabat—bonus demografi kedua ini bisa menjadi kekuatan baru. Sudah saatnya kita berhenti melihat lansia hanya sebagai kelompok rentan. Mereka adalah sumber pengalaman, kebijaksanaan, dan jaringan sosial yang luar biasa. Dengan strategi yang tepat, kita tidak hanya memetik manfaat ekonomi, tapi juga membangun masyarakat yang beradab—tempat semua orang bisa menua dengan sehat, produktif, dan bahagia.

Ringkasnya, dunia dan Indonesia menghadapi fenomena penuaan demografis yang nyata. Untuk itu, Indonesia—*including* Kaltara—harus progresif membangun kawasan ramah lanjut usia agar lansia tetap aktif, sehat, dan bermartabat serta dapat berperan dalam pembangunan. Membangun kawasan ramah lansia bukan hanya urusan sosial, tetapi juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Pemerintah 2024–2029.

Dalam misinya, Asta Cita menempatkan penguatan sumber daya manusia, pemerataan pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup seluruh warga tanpa diskriminasi sebagai prioritas utama. Lansia, sebagai bagian dari populasi yang terus bertambah setiap tahun, harus mendapat perhatian khusus agar tetap sehat, aktif, dan bermartabat.

Ketika kita merancang lingkungan yang aman, fasilitas yang mudah diakses, dan layanan yang ramah bagi lansia, sesungguhnya kita sedang mengimplementasikan semangat Asta Cita: membangun Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan bagi semua usia. Pada akhirnya, kawasan ramah lansia di Kalimantan Utara akan menjadi wujud nyata bahwa visi besar bangsa bukan sekadar janji di atas kertas, tetapi hadir di tengah kehidupan masyarakat.

Di tengah tren ini, visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terasa sangat relevan. Paling tidak ada tiga fondasi utama pembangunan yang relevan dengan semangat pemberdayaan lansia: tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Lansia jelas masuk dalam kelompok yang dimaksud, berdampingan dengan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Beberapa langkah nyata sudah dilakukan. Misalnya, Musrenbang Inklusif Mentari Kaltara—sebuah forum yang melibatkan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dalam perencanaan daerah.

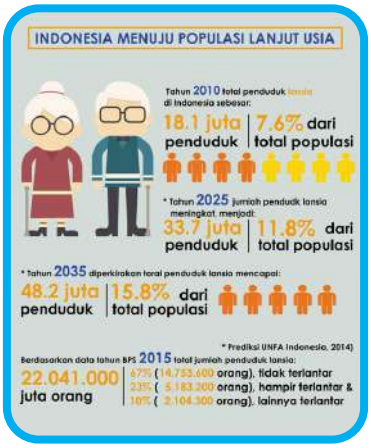
Di bidang data, Pemprov Kaltara telah mengembangkan Satu Data yang inklusif, termasuk memuat informasi kelompok rentan. Data ini ibarat peta: tanpa peta yang akurat, sulit menentukan arah. Dengan peta yang memuat data lansia—usia, kesehatan, pekerjaan, dan tingkat kemandirian—pemerintah bisa merancang program yang tepat sasaran. Prestasi Pemprov Kaltara dalam meraih peringkat ke-4 nasional dan terbaik di Kalimantan pada SPM Award dengan indeks pemenuhan 100% menunjukkan bahwa kapasitas tata kelola sudah kuat. Tinggal menambahkan komponen khusus dalam Standar Pelayanan Minimal yang mengukur kualitas layanan bagi lansia.

Definisi Kawasan Ramah Lansia

Kawasan ramah lansia bisa di gambarkan sebagai wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi lanjut usia, agar lansia tetap sehat, sejahtera, tangguh, mandiri, produktif dan berkualitas sesuai dengan UU No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia (Dwi endah 2020) kondisi ini memungkinkan lansia terlibat sebagai subjek pembangunan.

Sesuai PP No 43 tahun 2004, Pemerintah dapat menyiapkan Kawasan ramah lansia antara lain dengan menempatkan isu lansia sebagai salah satu prioritas pembangunan, meningkatkan anggaran pro lansia, menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi lansia yang produktif, menyediakan layanan informasi yang terintegrasi dengan layanan kesehatan dan alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Ramah Lansia.

Adapun kriteria Kawasan ramah lansia sesuai Permensos No 4 tahun 2017 terdiri atas:
Memiliki kebijakan kelanjutusiaan, Perumahan dan kawasan pemukiman, Ruang terbuka dan bangunan yang ramah lanjut usia, Transportasi yang ramah lanjut usia, Penghormatan dan inklusi sosial. Selanjutnya Partisipasi sosial, Partisipasi sipil, Pekerjaan yang ramah lanjut usia, Dukungan komunitas dan pelayanan sosial, Pelayanan kesehatan, Layanan keagamaan dan mental spiritual, Komunikasi dan informasi, Advokasi sosial, Bantuan hukum dan/atau Pelindungan lanjut usia dari ancaman dan tindak kekerasan.



Praktik Baik Mewujudkan Kawasan Ramah Lansia di Dunia, Indonesia, dan Kalimantan Utara

Pertumbuhan populasi lanjut usia di Indonesia terus meningkat, mencapai 11,75% pada 2023 (BPS 2023). Tren ini menuntut daerah untuk segera membangun kawasan ramah lansia, bukan sekadar wacana. Di berbagai wilayah, praktik baik telah terbukti berhasil menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan inklusif bagi warga senior. Menyediakan standar pelayanan minimum bagi lansia di semua lini bukanlah semata kebutuhan hari ini, tetapi juga investasi untuk masa depan. Data menunjukkan, setiap tahun jumlah lansia terus bertambah.

Mereka yang bahkan kini masih bermain riang sebagai balita, suatu hari akan menapaki usia senja, dan saat itulah mereka akan membutuhkan pelayanan yang ramah lansia. Merancang lingkungan dan kebijakan yang berpihak pada lansia berarti kita sedang menyiapkan dunia yang layak, bukan hanya untuk mereka yang telah menua sekarang, tetapi juga untuk diri kita sendiri dan generasi setelah kita.

Klaster Internasional: Belajar dari Negara dengan Implementasi Nyata

Belajar dari negara-negara maju dan berkembang yang telah menerapkan kebijakan dan infrastruktur ramah lansia secara nyata, berikut adalah contoh implementasi konkret dari berbagai kota di Asia diantaranya:

Toyama, Jepang – Sistem transportasi publik ramah lansia, jalur pejalan kaki aman, halte bus rendah lantai, serta program kesehatan berbasis komunitas *(Japan Ministry of Health, Labour and Welfare 2024).*

Singapura – Integrasi hunian HDB *senior-friendly* dengan pusat kegiatan lansia, klinik, dan taman interaktif di radius jalan kaki *(Singapore Ministry of Social and Family Development 2024).*

Kota Putrajaya, Malaysia – Taman publik dengan jalur landai, kursi istirahat berkanopi setiap 50 meter, dan senam pagi rutin gratis *(Department of Social Welfare Malaysia 2024).*

Klaster Nasional: Kota-Kota di Indonesia yang Sudah Berjalan

Seiring meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia, beberapa kota telah menginisiasi program lokal yang responsif terhadap kebutuhan lansia. Berikut adalah contoh implementasi konkret dari lima kota yang telah memulai langkah nyata :

Yogyakarta – Program Kampung Ramah Lansia lengkap dengan posyandu lansia, pelatihan keterampilan, dan sekolah lansia (Dinas Sosial Kota Yogyakarta 2024).

Jakarta – Posbindu dan RPTRA dengan fasilitas olahraga ringan, pendampingan kesehatan, serta akses ramah kursi roda (Pemprov DKI Jakarta 2024).

Surabaya – Posyandu lansia hampir di seluruh kelurahan, ditambah kegiatan berkebun dan kerajinan (Pemkot Surabaya 2024).

Bogor – Kampung Ramah Lansia berbasis gotong royong, pendampingan harian, dan layanan darurat

cepat (Dinas Kesehatan Kota Bogor 2024).

Denpasar – Program "Satgas Lansia" untuk kunjungan rutin memeriksa kesehatan dan memberi dukungan psikologis (Pemkot Denpasar 2024).

Kondisi Kalimantan Utara: Peluang dan Tantangan

Di Kalimantan Utara, kesadaran terhadap pentingnya kawasan ramah lansia sudah tumbuh. Beberapa Kabupaten/Kota telah memiliki posyandu lansia, kegiatan senam bersama di ruang publik, serta layanan kunjungan rumah bagi lansia yang tidak mampu datang ke fasilitas kesehatan (Dinas Kesehatan Kalimantan Utara 2024). Namun, fasilitas residensial khusus lansia masih sangat terbatas. Saat ini, hanya ada satu panti lansia milik pemerintah, yaitu Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Panti ini menjadi satu-satunya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dan perawatan bagi lansia yang membutuhkan perhatian khusus. Di sektor swasta, hanya terdapat LKSLU Almarhamah di Kota Tarakan.

Belum adanya kebijakan daerah atau peraturan daerah (Perda) khusus tentang pengembangan kawasan ramah lansia menjadi tantangan tersendiri. Ditambah lagi, infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai, jarak antar wilayah yang jauh, serta minimnya fasilitas publik dengan desain ramah lansia (BPS Kaltara 2024) membuat implementasi program ini memerlukan strategi khusus.

Meski demikian, peluang tetap terbuka lebar. Pemerintah Provinsi Kaltara dapat mengoptimalkan pendekatan pentahelix—kolaborasi lima sektor yang mencakup pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas/masyarakat.

Pemerintah. Menyusun kebijakan daerah, mengalokasikan anggaran khusus, serta memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencakup layanan lansia secara komprehensif.

Akademisi. Melakukan riset, memberikan rekomendasi berbasis data, dan mengembangkan model kawasan ramah lansia yang sesuai dengan karakter geografis Kaltara.

Pelaku usaha. Berperan dalam penyediaan fasilitas publik, transportasi, perumahan, dan teknologi pendukung kehidupan lansia.

Media. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kawasan ramah lansia, sekaligus mengangkat praktik baik yang sudah ada di lapangan.

Komunitas/masyarakat. Menggerakkan partisipasi warga, membangun jejaring relawan, dan menciptakan lingkungan sosial yang inklusif bagi lansia.

Jika kolaborasi pentahelix ini berjalan sinergis, Kaltara memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi perintis kawasan ramah lansia di Kalimantan. Keunggulan ini bukan hanya akan meningkatkan kualitas hidup warga senior, tetapi juga menciptakan citra positif daerah, memperkuat ikatan sosial lintas generasi, dan memberikan contoh bagi provinsi lain di Indonesia.

Arah Pengembangan

Kaltara memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi perintis kawasan ramah lansia di Kalimantan. Dengan meniru praktik baik dari Toyama, Singapura, hingga Yogyakarta, pemerintah daerah dapat membangun kebijakan yang mencakup Transportasi publik inklusif, Pusat kegiatan lansia berbasis komunitas, Fasilitas publik dengan akses universal, Program pendampingan kesehatan dan sosial, Kegiatan multigenerasi yang melibatkan lansia secara aktif. Jika langkah ini diambil, Kaltara tidak hanya mampu melayani warganya yang senior, tetapi juga menjadi model inspiratif bagi daerah lain di Indonesia.

Sebagai penutup, mari kita bayangkan sebuah sore cerah yang teduh taman di tepian Tanjung Selor. Kakek memimpin senam di ruang terbuka hijau tanpa khawatir tersandung, nenek mengajari anak-anak membuat kerajinan tangan khas Kaltara, sementara kelompok lansia lain memimpin kegiatan budaya diiringi musik tradisional mengalun pelan.

Mereka bukan sekadar penerima manfaat, tetapi motor penggerak dan pelestari budaya, kebahagiaan lintas generasi terajut karena kita memberi ruang, waktu, dan rasa hormat kepada mereka yang telah lebih dulu menapaki jalan kehidupan. Inilah lansia Kaltara—sehat, mandiri, aktif, dan terus memberi makna bagi generasi setelahnya. Semoga!

[1] Ketua Yayasan Almarhamah Kaltara - Koordinator JMS Kaltara



TANTANGAN MEWUJUDKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH

[Penulis : Reni Kusuma [1]]



Di balik banyaknya bangunan sekolah-sekolah negeri di Kalimantan Utara, tawa ceria dan riuh canda anak-anak memenuhi setiap sudut sekolah negeri yang sudah berkembang. Mereka belajar, bermain, dan bermimpi bersama, seakan dunia terbuka luas untuk mereka raih. Namun, di balik keceriaan itu, ada sekelompok anak yang terpinggirkan, Anak-Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang masih harus menatap dari luar, menunggu pintu sekolah yang belum sepenuhnya terbuka untuk mereka.

Mereka bukan tak ingin bergabung, tapi realita masih memaksa mereka menjadi tamu yang tak diundang dalam ruang pendidikan formal yang seharusnya menjadi rumah bagi semua anak tanpa terkecuali. Menurut data statistik yang dipublikasikan Kemenko PMK pada Juni 2022, angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%.

Sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut (2021) adalah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.833 jiwa. Kemudian, data Kemendikburistek per Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak.

Dengan data tersebut, presentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sejumlah 12.26%. Artinya masih sangat sedikit dari anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan inklusif, padahal dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat.

Padahal dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1): Menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Setiap warga negara memiliki hak pendidikan yang sama tak terkecuali ABK. Serta ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, termasuk ABK.

Namun di lapangan, kebijakan ini belum terimplementasi dengan baik. Sekolah umum belum didesain inklusif. Guru-guru belum terlatih untuk menghadapi anak-anak dengan kebutuhan berbeda. Bahkan, banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas dasar seperti jalur kursi roda, juru bahasa isyarat untuk anak tuna rungu atau ruang tenang untuk anak dengan spektrum autisme.



Alex (bukan nama sebenarnya), seorang anak dengan kebutuhan khusus ADHD *(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)*, pernah mengalami perundungan, termasuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh gurunya disebuah sekolah di Kabupaten Bulungan. Sifatnya yang aktif, yang merupakan salah satu karakteristik umum pada anak dengan ADHD sering disalahartikan oleh lingkungan sebagai perilaku nakal atau mengganggu. Tidak adanya pelatihan untuk guru serta kurangnya pemahaman mengenai ADHD membuat Alex tidak mendapatkan pendekatan pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Sebaliknya, ia menerima hukuman yang tidak mendidik secara fisik. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Bulungan bahkan Kalimantan Utara, banyak ABK mengalami perlakuan serupa: distigma, disisihkan, dan kehilangan hak atas pendidikan yang aman serta inklusif.

Sementara itu, tidak semua dari mereka cocok bersekolah di SLB, sehingga kesenjangan layanan pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus masih menjadi tantangan besar. Pendidikan inklusif masih jadi wacana, kurikulum di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan pun masih belum ada yang bisa sesuai dengan pendidikan inklusif. Anak-anak berkebutuhan khusus seringkali dipaksa mengikuti pola belajar yang kaku dan seragam, tanpa mempertimbangkan kemampuan dan cara belajar mereka.

Akibatnya, banyak dari ABK merasa gagal bahkan sebelum benar-benar memulai. Siapa yang patut kita salahkan? Apakah guru-gurunya, apakah murid ABKnya?. Masalahnya bukan pada keduanya, masalahnya adalah sistem yang belum bersedia menyesuaikan. Masih ada pandangan bahwa pendidikan untuk ABK adalah tugas SLB, padahal banyak dari mereka bisa dan ingin bersekolah di sekolah umum asal diberi kesempatan dan pendekatan yang tepat.

Alhasil, harapan justru hadir dari komunitas dan organisasi masyarakat sipil. Yayasan seperti Faqih Hasan Center (FHC) hadir dan mencoba mengisi kekosongan itu. Mereka membuka Rumah Pendampingan Anak, menyelenggarakan PKBM inklusi, hingga mendorong kebijakan serta advokasi ke pemerintahan untuk kesejahteraan disabilitas dan ABK. Tapi Yayasan tidak bisa bergerak dan berjalan dengan sendiri. Pemerintah daerah harus turun tangan lebih serius.

Sistem pendidikan harus berhenti menganggap ABK sebagai beban maupun stigma negatif dan mulai melihat mereka sebagai anak bangsa yang punya potensi, jika diberikan ruang yang aman dari tindak diskriminatif dan layak bagi semua anak termasuk ABK. Pendidikan inklusif tidak berhenti pada penerimaan anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah negeri, tetapi juga pada bagaimana mereka dapat hidup berdampingan dan berkolaborasi dengan teman sekelasnya. Anak berkebutuhan khusus tidak hanya menjadi "tamu" di sekolah negeri, tetapi benar-benar dapat berkolaborasi, berbaur, dan tumbuh bersama teman sebayanya.

Karena inklusi bukan soal belas kasihan atau sekedar rasa iba. Tetapi ini soal keadilan, keadilan yang setara tanpa memandang latar belakang ataupun hambatan anak, dan bagaimana menyiapkan generasi masa depan yang lebih peduli, toleran, dan inklusif. Karena sekolah sejatinya bukanlah tempat yang memaksa anak menyesuaikan diri, melainkan tempat yang berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan setiap anak. Sudah saatnya keadilan hadir di ruang-ruang kelas di Kalimantan Utara.

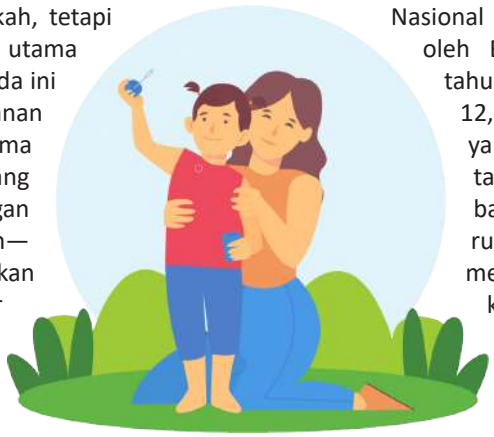
[1] Ketua Divisi Umum Faqih Hasan Center (FHC)



STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN IBU TUNGGAL DI KALIMANTAN UTARA

[Penulis : Rina Sri Wahyuni [1]]

Ibu tunggal tidak hanya memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pengasuh utama anak-anak mereka. Peran ganda ini seringkali menyebabkan tekanan psikologis yang berat, terutama bagi mereka yang menjadi orang tua tunggal karena kehilangan pasangan akibat kematian—yang umumnya memberikan dampak psikologis lebih besar dibandingkan perceraian.



Perubahan struktur keluarga dari dua orang tua menjadi satu orang tua sering menimbulkan ketidakseimbangan dalam fungsi rumah tangga. Seluruh beban, baik ekonomi maupun emosional, harus ditanggung oleh ibu tunggal. Ini menciptakan tantangan kesejahteraan yang serius.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2023

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tercatat bahwa 12,73 persen perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Hal ini menandakan bahwa sekitar 1 dari 10 rumah tangga di Indonesia menjadikan perempuan sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk mendapatkan penghasilan guna membantu perekonomian keluarga.

Mayoritas ibu tunggal bekerja di sektor informal. Menurut survei Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), sekitar 95 persen ibu tunggal bekerja secara informal, dan hampir separuh dari mereka berpenghasilan di bawah Rp 500.000 per bulan. Kondisi ini mencerminkan kerentanan ekonomi yang tinggi.

Di sisi lain, stigma sosial terhadap ibu tunggal masih kuat. Mereka kerap mengalami diskriminasi sosial dan kurang mendapatkan pengakuan atas peran mereka dalam keluarga maupun masyarakat. Ibu tunggal di Kalimantan Utara memegang peran penting dalam membangun keluarga yang tangguh, namun menghadapi tantangan yang kompleks.

Keterbatasan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, dan minimnya layanan sosial membuat

kesejahteraan ibu tunggal menjadi isu yang perlu mendapat perhatian khusus. Berbagai kasus menunjukkan bahwa perempuan yang harus menjadi orang tua tunggal sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Dalam upaya bertahan hidup, muncul fenomena sosial seperti praktik kawin kontrak di beberapa desa di Kalimantan Utara. Praktik ini dilakukan sebagian ibu tunggal sebagai strategi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Namun, alih-alih menjadi solusi jangka panjang, praktik tersebut justru menimbulkan persoalan baru, seperti terpisahnya ibu dan anak selama masa kontrak serta potensi eksploitasi perempuan. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan turut memperparah kondisi generasi muda.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 tercatat sekitar 22,3 persen remaja berusia 16 hingga 18 tahun di Kalimantan Utara tidak lagi mengenyam pendidikan formal dengan alasan ekonomi sebagai penyebab utama. Situasi ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami ibu tunggal juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan pendidikan anak, sehingga memperbesar risiko kemiskinan antar generasi.

Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) (Persen)

Kelompok Umur Sekolah	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
	2023	2023	2023
7–12	0,7	99,2	0,1
13–15	0,0	97,0	3,0
16–18	0,7	77,0	22,3
19–24	5,1	27,6	67,3
7–24	1,9	73,3	24,8

Keterangan Data :

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MaretCatatan: Termasuk pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, atau Paket C)

Tantangan Utama

Pertama, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial masih menjadi hambatan utama. Banyak ibu tunggal kesulitan mencukupi kebutuhan pokok keluarga seperti makanan bergizi, layanan kesehatan dasar, dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Ketimpangan akses ini membuat posisi ibu tunggal semakin rentan terhadap kemiskinan dan keterpinggiran sosial.

Kedua, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar ibu tunggal berdampak langsung pada keterbatasan peluang kerja yang layak. Saat ini, mayoritas ibu tunggal hanya mampu bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu, tanpa jaminan sosial, dan tanpa peluang pengembangan karier. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup keluarga secara berkelanjutan.

Ketiga, minimnya intervensi dari pemerintah dalam bentuk program yang spesifik untuk ibu tunggal dan anak-anak mereka juga menjadi kendala serius. Akses terhadap pelatihan keterampilan, subsidi ekonomi, layanan kesehatan khusus, maupun bantuan pendidikan masih sangat terbatas. Akibatnya, anak-anak dari ibu tunggal sering kali tidak memperoleh perlindungan dan dukungan yang memadai untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Keempat, belum adanya regulasi atau kebijakan yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan ibu tunggal menyebabkan penanganan isu ini berlangsung secara tidak terstruktur. Tanpa kerangka hukum yang jelas, program-program yang ditujukan bagi ibu tunggal cenderung berjalan secara sporadis, tidak terkoordinasi, dan berisiko tumpang tindih, sehingga menghambat efektivitas intervensi jangka panjang.

Kelima, distribusi program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga ibu tunggal belum merata. Banyak anak dari keluarga tidak mampu yang seharusnya layak menerima bantuan pendidikan justru tidak terdata atau tidak memenuhi persyaratan administratif, seperti kepemilikan dokumen resmi. Akibatnya, ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas tetap tinggi dan memperkecil peluang generasi berikutnya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan struktural.

Selain tantangan struktural tersebut, tingginya angka pernikahan dini juga turut berkontribusi

terhadap meningkatnya jumlah ibu tunggal di Kalimantan Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi perempuan usia 20-24 tahun di Kalimantan Utara yang sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun tercatat sebesar 6,94 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 14 perempuan muda di provinsi ini pernah menikah pada usia yang secara hukum masih tergolong anak.

Perempuan yang menikah pada usia muda tanpa bekal pendidikan dan kesiapan ekonomi yang cukup lebih rentan mengalami perceraian, sehingga akhirnya harus menanggung peran ganda sebagai ibu tunggal. Kondisi ini diperburuk oleh stigma sosial yang masih kuat terhadap status ibu tunggal, yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental, kepercayaan diri, serta integrasi sosial mereka dalam kehidupan bermasyarakat.



ilustrasi : freepik

Strategi dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kesejahteraan ibu tunggal di Kalimantan Utara, diperlukan langkah strategis yang terintegrasi:

Pertama, Penguatan Kebijakan Perlindungan Sosial yang Spesifik bagi Ibu Tunggal. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan perlindungan sosial yang secara eksplisit menyasar kebutuhan ibu tunggal. Program ini harus mencakup subsidi pangan, akses layanan kesehatan gratis atau berbasis subsidi, serta bantuan tunai bersyarat *(conditional cash transfer)* yang difokuskan pada kebutuhan dasar ibu dan anak.

Selain bantuan langsung, penting juga untuk merancang skema pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, seperti pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, akses terhadap modal usaha mikro, dan kemitraan dengan sektor swasta maupun BUMDes. Tujuannya adalah mendorong kemandirian ekonomi ibu tunggal, bukan sekadar ketergantungan pada bantuan.

Kedua, Penyusunan Regulasi Daerah yang Komprehensif dan Berperspektif Gender. Diperlukan regulasi khusus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan ibu tunggal. Regulasi ini dapat mencakup kebijakan yang menyediakan akses pendidikan formal dan nonformal sesuai usia, baik untuk ibu tunggal maupun anak-anak mereka. Pendidikan formal dapat membantu anak anak ibu tunggal mendapatkan peluang yang lebih baik di masa depan, sementara pendidikan nonformal dapat memberikan keterampilan yang relevan bagi ibu tunggal untuk meningkatkan taraf hidup. Selain itu, regulasi ini perlu memastikan bahwa semua intervensi bersifat inklusif, tanpa diskriminasi, dan didasarkan pada kebutuhan.

Ketiga, Pemetaan dan Penyaluran Beasiswa secara Tepat Sasaran. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pendataan ibu tunggal dan anak-anak mereka secara terpadu agar program beasiswa dan bantuan pendidikan dapat diberikan secara tepat sasaran. Program beasiswa harus menjangkau seluruh anak dari keluarga ibu tunggal

yang tergolong miskin atau rentan miskin, termasuk mereka yang tidak memiliki dokumen administrasi lengkap.

Bantuan ini harus mencakup pembiayaan biaya sekolah, perlengkapan pendidikan, serta kebutuhan transportasi atau dukungan psikososial. Dengan memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak ibu tunggal, peluang mereka untuk memutus lingkaran kemiskinan akan semakin terbuka.

Selanjutnya, Pencegahan Pernikahan Dini dan Penanggulangan Stigma Sosial. Tingginya angka pernikahan dini yang turut menyumbang tingginya jumlah ibu tunggal harus direspons dengan intervensi preventif. Pemerintah perlu menggandeng tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan dalam kampanye edukatif mengenai risiko pernikahan usia anak, pentingnya pendidikan, serta kesetaraan gender.

Selain itu, perlu dilakukan upaya sistematis untuk menghapus stigma negatif terhadap ibu tunggal melalui pendidikan publik, pelibatan media, dan advokasi berbasis komunitas. Mengurangi stigma sosial akan meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu tunggal dan memperkuat integrasi mereka dalam kehidupan sosial.

Terakhir, Integrasi dan Sinkronisasi dengan Kebijakan yang sudah ada. Seluruh rekomendasi di atas perlu diintegrasikan dengan kebijakan yang telah berlaku, seperti Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Utara.

Perlu ada mekanisme koordinasi antar instansi dan pelibatan organisasi masyarakat sipil agar implementasi kebijakan tidak berjalan sektoral dan sporadis. Sinkronisasi ini penting agar program berjalan secara berkelanjutan, berbasis bukti, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan ibu tunggal dan anak-anak mereka.

> ***Stigma sosial terhadap ibu tunggal masih kuat. Mereka kerap mengalami diskriminasi sosial dan kurang mendapatkan pengakuan atas peran mereka dalam keluarga maupun masyarakat.***



[1] Wakil Ketua PUSPA BENUANTA Provinsi Kalimantan Utara



PSYCHOLOGICAL FIRST AID (PFA) PADA ANAK KORBAN PERCERAIAN ORANG TUA

[Penulis : Nuraini Asri[1]]

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia pada Tahun 2020 tercatat angka perceraian sebesar 291.667 kasus, kemudian meningkat secara signifikan tahun 2021 menjadi 447.743 kasus. Di Tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 448.126 kasus. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 408.347 kasus, dan pada tahun 2024 juga mengalami penurunan menjadi 399.921 kasus perceraian yang diakibatkan oleh banyak faktor seperti zina, mabuk, madat, judi, poligami, KDRT, pertengkaran terus-menerus, ekonomi, dan lain-lain.



Untuk Provinsi Kalimantan Utara sendiri pada Tahun 2023 tercatat 1.218 kasus dan Tahun 2024 tercatat 931 kasus perceraian. Dari jumlah kasus perceraian diatas, kita bisa bayangkan berapa jumlah anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi psikologis anak yang orang tuanya bercerai? Dampak psikologis anak-anak korban perceraian rentan mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan bahkan gangguan kepribadian jika tidak ditangani dengan baik.

Anak-anak mungkin merasa marah, sedih, takut, dan cemas akibat perpisahan orang tua. Perceraian dapat memicu perubahan perilaku seperti menarik diri dari lingkungan sosial, prestasi akademik menurun, kesulitan menjalin hubungan, dan bahkan menjadi lebih posesif. Anak-anak mungkin sulit mengontrol emosi mereka, menjadi lebih pemarah, atau bahkan mengalami tantrum. Beberapa anak mungkin mengalami perubahan pola makan dan tidur setelah perceraian.

Sedangkan dampak sosial dan akademik adalah prestasi belajar menurun, konsentrasi belajar bisa terganggu, motivasi belajar menurun, dan hasil akademik bisa menurun. Selain itu kesulitan berinteraksi karena mereka mungkin menjadi pemalu, pendiam, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Perceraian yang diwarnai konflik tinggi antara orang tua cenderung memberikan dampak yang lebih buruk pada anak. Anak-anak yang lebih muda lebih rentan terhadap dampak perceraian karena mereka belum memahami sepenuhnya situasi tersebut. Bahkan menurut beberapa riset ada korelasi antara perceraian orang tua dengan kasus kenakalan remaja.

Apa yang dimaksud *Psychological First Aid (PFA)?*

Psychological First Aid (PFA) atau pertolongan pertama pada psikologi adalah pertolongan psikologis awal yang diberikan kepada individu atau komunitas yang mengalami krisis atau bencana. Tujuannya bukan menyembuhkan gangguan

psikologis, tetapi untuk mengurangi penderitaan awal, meningkatkan rasa aman, dan memfasilitasi adaptasi yang sehat.
Mengapa PFA penting bagi anak korban perceraian? Tujuannya untuk memberikan dukungan psikologis awal dan mengurangi dampak negatif dari situasi traumatis akibat perceraian. Perceraian orang tua, terutama bagi anak-anak, dapat menjadi pengalaman yang sangat traumatis dan penuh tekanan. PFA dapat membantu anak-anak untuk mulai memproses perasaan mereka, membangun ketahanan diri, dan mengurangi risiko masalah kesehatan mental jangka panjang.

Adapun tujuan PFA untuk anak korban perceraian adalah sebagai berikut :

Pertama, PFA memberikan rasa aman dan nyaman. PFA membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak untuk mengekspresikan perasaannya.
Kedua, membantu anak memahami situasi. PFA dapat membantu anak memahami apa yang sedang terjadi dan mengurangi kebingungan atau ketakutan.
Ketiga, membangun ketahanan diri. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak dapat belajar untuk mengatasi tantangan dan membangun ketahanan diri.
Tidak kalah penting, **mencegah masalah kesehatan mental.** PFA dapat membantu mengurangi risiko masalah kesehatan mental jangka panjang seperti depresi atau kecemasan.
Terakhir, **memfasilitasi pemulihan.** PFA membantu anak-anak untuk mulai pulih dari dampak negatif perceraian dan melanjutkan hidup mereka.
PFA dapat diberikan oleh siapa saja yang telah memahami prinsip-prinsip dasar PFA, termasuk orang tua, guru, anggota keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental. Penting untuk diingat bahwa PFA bukanlah terapi, tetapi merupakan dukungan awal yang dapat diberikan untuk membantu anak-anak menghadapi situasi sulit.

Prinsip-prinsip PFA yang perlu diperhatikan:
- *Look* (Lihat) : Amati dan perhatikan kondisi anak, perhatikan tanda-tanda stres atau kesulitan.
- *Listen* (Dengarkan): Berikan perhatian penuh dan dengarkan cerita anak dengan empati.
- *Link* (Hubungkan): Bantu anak terhubung dengan orang-orang yang dapat memberikan dukungan.

Upaya memahami dan menerapkan P*sychological First Aid* (PFA) bagi anak-anak yang mengalami trauma, termasuk korban perceraian atau krisis keluarga, tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan kolektif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenaga profesional hingga komunitas, agar prinsip-prinsip PFA benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan. Langkah awal yang krusial adalah Sosialisasi dan edukasi mengenai PFA kepada OPD yang bersentuhan dengan anak-anak yang dapat dilakukan oleh Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Namun, edukasi tidak boleh berhenti di level birokrasi, perlu bersinergi dalam menyosialisasikan PFA kepada orang tua, guru, tokoh adat, tokoh agama, remaja dan anak serta seluruh lapisan masyarakat yang dapat dilakukan oleh Himpsi, Kemenag, DP3AP2KB, Diknas, Dinkes, Dinsos dan BPBD.

Tak kalah penting, kampanye Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) harus digencarkan melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial yang dapat dilakukan oleh Diskominfo, DP3AP2KB, Kemenag, Diknas, Dinkes, dan Dinas Sosial. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PFA, kita dapat memberikan dukungan yang berharga bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian, membantu mereka melewati masa sulit ini dan tumbuh menjadi individu yang kuat dan sehat.

[1] Analis Kebijakan Ahli Muda DP3AP2KB Provinsi Kaltara





SUARA HATI PENYANDANG DISABILITAS, JALAN MENUJU KESETARAAN YANG BERMAKNA

[Penulis : Ayu Lesmana[1]]

Kesetaraan bukanlah sebuah keistimewaan, melainkan hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Bagi penyandang disabilitas, kesetaraan sering kali masih terasa sebagai perjalanan panjang yang belum selesai. Suara hati ini hadir bukan untuk menuntut lebih, melainkan untuk mengingatkan kita semua bahwa kesetaraan yang bermakna harus diwujudkan dalam keseharian, setelah tertuang dalam tulisan kebijakan.

Kami menyadari, memaknai dan mengapresiasi langkah besar yang telah ditempuh Pemerintah dalam membuka jalan menuju kesetaraan. Mulai dari dibangunnya suatu regulasi, komitmen telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan, dan forum yang memberi ruang bagi kelompok rentan untuk bersuara. Ini adalah langkah awal yang penting, karena tanpa dasar kebijakan, kesetaraan hanya akan berhenti sebagai wacana.

Namun, perjalanan belum selesai. Tantangan masih ada ketika implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan semangat kesetaraan. Semangat ini yang harusnya tercermin dalam pelayanan publik, dalam cara masyarakat berinteraksi, dan dalam bagaimana ruang-ruang sosial dibangun. Kenyataannya, masih ada pengalaman di mana penyandang disabilitas dipandang sebelah mata, dilayani setengah hati, bahkan dianggap merepotkan. Padahal, jika sejenak saja kita bertukar posisi, mungkin akan terasa betapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk bertahan dalam situasi itu. Namun, pengalaman ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk membuka mata bersama.



Harapan kami sederhana: agar para pemangku kepentingan tidak hanya menjadi pencetus kebijakan, tetapi juga teladan dalam penerapan. Agar masyarakat tidak hanya mendengar istilah kesetaraan, tetapi juga mempraktikkannya dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Karena sesungguhnya, yang kami rindukan bukanlah perlakuan istimewa, **melainkan ruang yang sama untuk diakui sebagai manusia yang setara.** Kesetaraan yang bermakna berarti melihat perbedaan bukan sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari keberagaman yang memperkaya. Ini soal merajut rasa kebersamaan, menumbuhkan penghargaan, dan menempatkan setiap individu pada derajat yang sama.

Mari bersama-sama menjadikan kesetaraan bukan sekadar jargon, tetapi realitas. Karena kamu, aku, dan kita—adalah satu, meski hadir dengan bentuk dan cara yang berbeda.

[1] Anggota PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Provinsi Kaltara. Seorang dengan Disabilitas Daksa

SPM
AWARD 2025



Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award Tahun 2025 kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang S.H., M.Hum



bappedalitbang_kaltara | bappedadanlitbangprov_kalimantanutara | bappeda&litbangprovkaltara | bappedalitbang_kaltaraprov.go.id



MUSRENBANG RPJMD 2025–2029
KALTARA MANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara resmi meluncurkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang digelar secara hybrid, Rabu (25/6).

Musrenbang yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menjadi momentum penting dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis yang menjadi fondasi RPJMD 2025–2029. Ia juga mengungkapkan rumusan program unggulan yang akan menjadi prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara.

"Kami ingin pembangunan di Kaltara tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. RPJMD ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan komitmen nyata untuk mewujudkan fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan," tegas Gubernur.

Turut memberikan arahan dalam acara ini, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, yang mewakili Menteri Dalam Negeri. Dalam paparannya, Restuardy menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan.

"Koordinasi antara pusat dan daerah harus terus diperkuat. RPJMD harus menjadi instrumen yang

mampu menjawab tantangan lokal sekaligus mendukung pencapaian tujuan nasional," ujarnya. Selain itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan Pembangunan Regional, Tri Dewi Virgiyanti, menyampaikan pentingnya perencanaan yang berbasis data, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi, terutama dalam konteks percepatan pembangunan daerah perbatasan seperti Kaltara.

Sebagai penyelenggara, Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Bertius, memaparkan rancangan awal RPJMD yang telah melalui serangkaian kajian teknis dan forum lintas perangkat daerah sebelumnya. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan strategis selama sesi diskusi.

Musrenbang ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kaltara, Bupati dan Walikota se-Kaltara, pimpinan perangkat daerah provinsi, Bappeda kabupaten/kota, instansi vertikal seperti BPK, BPKP, BI, Ombudsman, BPJS, serta perwakilan akademisi, LSM, ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan kelompok perempuan serta masyarakat rentan.

Setiap keterwakilan dari berbagai unsur tersebut menyampaikan rekomendasi, aspirasi, dan koreksi terhadap rancangan RPJMD. Banyak masukan yang fokus pada penguatan infrastruktur perbatasan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam, serta perlindungan lingkungan dan hutan.

Rancangan akhir RPJMD akan disempurnakan berdasarkan masukan dari forum ini, sebelum kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah. "Kita bangun Kaltara bersama-sama. Dari forum ini, kita harapkan lahir kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat," pungkas Gubernur Zainal A. Paliwang. (ENR)





SOSIALISASI STUNTING UNTUK TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

> Stunting bukan sekadar masalah kesehatan, melainkan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia.



Tarakan — Dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan stunting bagi satuan pendidikan jenjang SMA. Acara yang berlangsung di Hotel Diamond Tarakan, 3-5 Juni 2025 ini menghadirkan narasumber kunci, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Kaltara, Bertius, S.Hut., yang menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif berbasis data untuk menekan prevalensi stunting di daerah tersebut.

Stunting: Masalah Kronis yang Memerlukan Solusi Holistik

Kepala Bappeda Litbang Provinsi Kaltara membuka paparannya dengan definisi stunting menurut WHO, yakni gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama. “Stunting bukan sekadar masalah kesehatan, melainkan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia kita,” tegasnya. Data SSGI Kemenkes RI menunjukkan, prevalensi stunting di Kaltara pada 2024 mencapai 17,6%, naik 0,2% dari tahun sebelumnya. Angka ini masih jauh dari target nasional 14% pada 2024.

Fakta mencolok terungkap saat beliau memaparkan disparitas antar kabupaten. “Kabupaten Bulungan dan Nunukan masih belum selesai dalam penghitungan data stunting, Kabupaten Malinau masih terjadi peningkatan sementara Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren penurunan,” ujarnya. Hal ini, menurutnya, mencerminkan perlunya pendataan lebih akurat dan intervensi yang tepat sasaran.



6 Pilar Strategi dan Peran Kritis Pendidikan

Dalam pemaparan lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa Kaltara mengadopsi 6 pilar strategi nasional pencegahan stunting, dengan penekanan pada:

Komitmen politik (dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur).

Perubahan perilaku, melalui edukasi, termasuk peran sekolah dalam sosialisasi gizi remaja.

Konvergensi program lintas OPD, seperti integrasi anggaran di APBD.

Ketahanan pangan, termasuk optimalisasi pekarangan untuk bahan bergizi.

“Dinas Pendidikan memegang peran krusial dalam intervensi sensitif, seperti edukasi reproduksi remaja dan pemetaan siswa rentan stunting,” tambahnya. Ia mencontohkan program pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri di SMA/SMK serta kolaborasi dengan UKS untuk kurikulum kesehatan.

Pada sesi diskusi, terdapat beberapa masukan dari guru-guru terkait langkah yang bisa diambil dalam pencegahan dan penanggulangan stunting yaitu mengharapkan adanya peran Bappeda dan Litbang masuk ke dalam sekolah agar dapat memberikan edukasi kepada siswi terkait pentingnya minum pil tambah darah, merangkul berbagai sektor masyarakat agar dapat mengurangi/menghilangkan budaya pernikahan usia anak yang dapat meyebabkan stunting.

Hal ini sangat penting karena dapat dipastikan pasangan usia anak yang menikah akan memiliki keturunan yang stunting. Masukan dari guru Pembina UKS SMAN 1 Tarakan yakni adanya modul makan bergizi dan panduan makan bergizi menggunakan bahan lokal daerah agar lebih mudah dijangkau dan lebih ramah di kantong, selain peserta kegiatan juga memberi masukan agar terkait dengan pesatnya perkembangan zaman dapat dimanfaatkan dengan edukasi pencegahan stunting lewat sosial media dan membuat perlombaan berkaitan dengan pencegahan stunting.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Pada kesempatan tersebut, Bertius juga menyampaikan evaluasi nasional yang menyebut intervensi stunting selama ini lebih fokus pada penanganan kasus ketimbang pencegahan. “Efektivitas intervensi hanya 10% jika tidak dibarengi pencegahan stunting baru,” katanya. Untuk itu, Kaltara berkomitmen memperkuat program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan mendorong peran aktif sekolah dalam memantau gizi siswa. Di akhir sesi, beliau mengajak semua pihak, termasuk para guru, untuk terlibat dan berkolaborasi bersama dalam kampanye perubahan perilaku, dan usaha dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting demi tercapainya generasi emas masa depan Provinsi Kalimantan Utara yang sehat, cerdas dan bebas stunting. (ROM)



FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH BAHAS RENCANA STRATEGIS 2025–2029 UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kaltara, Tanjung Selor, pada Kamis (19/6), menjadi wadah penting bagi integrasi perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif dan partisipatif.

Forum ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltara, instansi vertikal, akademisi, serta mitra pembangunan daerah, termasuk perwakilan dari GGGI, GIZ, YKAN, universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Tujuan penyelenggaraan forum lintas perangkat daerah diantaranya untuk mengkomunikasikan hasil analisis/kajian oleh perangkat daerah atas kebutuhan pelayanan perangkat daerah untuk lima tahun mendatang, memperoleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyepakatan tentang isu strategis, tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah jangka menengah, strategi dan kebijakan pelayanan, program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran rancangan awal RPJMD.

Sebanyak empat perangkat daerah dipilih untuk memaparkan rancangan renstra mereka, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perhubungan. Masing-masing pemapar menyampaikan rencana strategis sesuai *outline* yang telah ditetapkan, mencakup tujuan dan sasaran, program beserta *outcome,* strategi dan arah kebijakan, prioritas pencapaian, serta kebutuhan dukungan lintas sektor.

“Forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan di Kaltara tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi, sinergis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara Bertius, S.Hut dalam arahan teknisnya.

Beliau juga menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyusun renstra yang berbasis data, dan berorientasi pada pencapaian visi Kaltara sebagai provinsi maju, makmur, dan berkelanjutan.

“Perencanaan yang baik adalah fondasi pembangunan yang berkualitas. Dengan forum ini, kita harapkan Renstra yang dihasilkan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi peta jalan nyata untuk percepatan pembangunan di Kaltara,” tegasnya.

Diskusi intensif mengemuka dalam sesi tanya jawab dan pembahasan setelah setiap sesi paparan. Peserta dari perangkat daerah lain, akademisi, dan mitra pembangunan menyampaikan masukan strategis, terutama terkait kolaborasi lintas sektor, efisiensi anggaran, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

Forum yang berlangsung dari pagi hingga menjelang petang ini berlangsung dengan sukses. Dengan digelarnya Forum Lintas Perangkat Daerah ini, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya pada tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berbasis kolaborasi demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan selama lima tahun ke depan (ENR)



RPKD KALTARA DAN IKHTIAR MENGIKIS KEMISKINAN





Tanjung Selor – Di ujung utara Nusantara, di mana daratan bersambung langsung dengan negara jiran Malaysia dan hutan tropis bersisian dengan lautan lepas, Provinsi Kalimantan Utara terus berbenah menghadapi tantangan akut: kemiskinan. Dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, ketimpangan infrastruktur, serta rentan bencana, provinsi muda ini menempuh jalan perencanaan yang serius pengentasan kemiskinan melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029.

Penyusunan RPKD ini mengacu pada mandat Permendagri No. 53 Tahun 2020, yang mengintegrasikan kerja berbagai sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Tujuannya tiga: menjadi instrumen kebijakan, tolak ukur keberhasilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK), dan dasar penilaian kinerja kepala daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Kalimantan Utara memiliki karakteristik unik: luas wilayah mencapai 70.101 km² namun dihuni oleh populasi yang tersebar di pedalaman dan pulau-pulau kecil. Kabupaten Malinau sendiri mencakup lebih dari 55 persen dari keseluruhan luas provinsi. Konsekuensinya, distribusi layanan dasar seperti listrik, air bersih, jalan, pendidikan, dan kesehatan menjadi tantangan yang terus diperjuangkan.



Struktur penduduk Kalimantan Utara didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) sebesar 70,5 persen, namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam sektor-sektor formal. Maka, kebijakan pengurangan kemiskinan tak bisa hanya bertumpu pada bantuan sosial, melainkan juga peningkatan produktivitas, pendidikan kejuruan, serta keberpihakan pada sektor pertanian dan kelautan.

Pada 20 Juni 2025, ruang rapat Gunung Putih di Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara menjadi arena diskusi penting.

Draf RPKD 2025–2029 dibedah dan dikritisi, dipimpin oleh Kepala Bappeda dan Litbang Bertius, kemudian dilanjutkan oleh Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Mufied Azwar.

Rapat tersebut menyoroti pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pentingnya keselarasan data. Validitas data menjadi landasan utama karena tanpa itu, intervensi bisa meleset sasaran. Beberapa data yang dipakai mencakup Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), P3KE, dan Regsosek.

Poin menarik disampaikan oleh perwakilan SKALA, yang menyoroti penurunan kemiskinan perdesaan dari 9,23% (Maret 2024) menjadi 5,38% (September 2024). Penurunan ini dikaitkan dengan inflasi yang terkendali dan intervensi program berbasis desa. Namun, Dinas PUPR disebut masih belum menggarap isu rumah kumuh secara serius, terutama di Tarakan. Padahal, kondisi permukiman layak sangat menentukan kualitas hidup dan kesehatan warga miskin.

Dalam rapat, berbagai masukan disampaikan. Romih dari Bappeda dan Litbang mengusulkan agar indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) ditagging ke dalam RPKD, ini dimaksudkan agar setiap program mudah dimonitor capaian keberhasilannya. Erica dari Bappeda dan Litbang mempertanyakan soal pedoman penulisan. Ternyata, hanya Permendagri 53/2020 yang menjadi rujukan umum—tidak ada pedoman baku teknis lain. Maka, inisiatif dan strategi tiap daerah sangat menentukan wajah akhir dokumen RPKD masing-masing.

> Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah menjadi instrumen kebijakan, tolak ukur keberhasilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK), dan dasar penilaian kinerja Kepala Daerah dalam menanggulangi kemiskinan.



Pentingnya infrastruktur digital juga mencuat. Hamdan, perwakilan pengembangan aplikasi, menyampaikan kesiapan mereka untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi (monev). Ia mencontohkan aplikasi Gardu Penangkis (Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan) dan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS) yang telah membantu daerah lain dalam evaluasi dan pengelolaan data kemiskinan. Masukan teknis pun diberikan terkait integrasi data oleh BPS, perlunya update data keuangan daerah (hanya mencapai skor 2 dari 3), hingga pertanyaan tentang sistem e-Monev yang bisa membantu visualisasi angka kemiskinan.

Kepala Bappeda dan Litbang memastikan bahwa sebelum RPKD ditetapkan, koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah akan dilakukan, terutama memastikan kesesuaian data dan program. Sejumlah strategi seperti intervensi per sektor—pendidikan, infrastruktur, sosial, kesehatan—telah terpetakan dalam dokumen. Sebagai instrumen penting pembangunan daerah, RPKD Kaltara bukan hanya dokumen. Ia adalah peta jalan menuju keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perbatasan. Tantangannya memang kompleks—dari kekumuhan di perkotaan hingga jalan tanah di pedalaman. Tapi semangat untuk berubah dan merumuskan kebijakan yang berpihak tetap menyala dari ruang-ruang rapat kecil di Tanjung Selor.

Jika rencana ini dijalankan sungguh-sungguh, maka bukan tidak mungkin, dari bumi perbatasan yang jauh ini, sebuah cerita sukses penanggulangan kemiskinan Indonesia bisa ditulis ulang—dengan tinta harapan dari Kalimantan Utara. (ROM)

PERINGATI HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA 2025: HENTIKAN POLUSI PLASTIK

Tanjung Selor - Mengusung tema global *"Ending Plastic Pollution"* atau "Hentikan Polusi Plastik" jadi sorotan pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2025. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk membangun kesadaran kolektif akan darurat sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kesehatan.



"Pernahkah Anda berhenti sejenak, menghirup udara segar, dan merenung: 'Berapa lama lagi bumi bisa memberikan ini untuk kita?' Di tengah laju deforestasi, polusi, dan krisis iklim, Hari Lingkungan Hidup hadir bukan hanya sebagai pengingat, tapi juga sebagai panggilan jiwa—bahwa kita bukan pemilik, melainkan penjaga bumi ini. Setiap tahun pada tanggal 5 Juni, dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam. Hari ini mengingatkan kita bahwa setiap aksi kecil dari mengurangi sampah plastik hingga menanam pohon dapat memberi dampak besar bagi masa depan bumi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar serangkaian kegiatan yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Dengan mengusung tema "Hentikan Polusi Plastik", Kaltara menunjukkan komitmennya sebagai provinsi hijau yang peduli terhadap masa depan lingkungan. Kegiatan peringatan tahun ini dipusatkan di Tugu Cinta Damai Tanjung Selor pada 5 Juni 2025 lalu.

Gubernur Kalimantan Utara dalam sambutannya menyampaikan perlunya membuka mata tentang "Tiga krisis global" yang sedang melanda bumi: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. "Saat ini, bumi kita sedang dalam bahaya. Krisis ini bukan isapan jempol, melainkan ancaman nyata yang akan berdampak pada lingkungan, kesehatan, kehidupan masyarakat, bahkan laju pembangunan," tegasnya.

Suasana Hari Lingkungan Hidup diwarnai dengan pemandangan yang tak biasa namun menggugah semangat. Sebuah tantangan seru digelar yaitu lomba mengumpulkan sampah. Pelajar dan petugas kebersihan tampak antusias berlomba menyusuri area Sungai Kayan dan sekitarnya, memunguti sampah plastik dan aneka jenis sampah lainnya. Setiap kantong yang berhasil dikumpulkan kemudian ditimbang, siapa pun yang menyumbangkan sampah dengan bobot tertinggi, berhak membawa pulang hadiah menarik sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar.

Keseruan tak berhenti di situ, Komunitas pengrajin daur ulang turut hadir memamerkan hasil karya kreatif dari sampah plastik yang disulap menjadi kerajinan indah, fungsional dan bernilai ekonomi. Kolaborasi ini menjadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup bukan hanya meriah, tetapi juga memaknai tentang bagaimana aksi kecil bisa memberi dampak besar bagi bumi kita.(NF)

VERIFIKASI INOVASI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025



Tanjung Selor - Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan inovasi daerah, Bappeda dan Litbang melaksanakan kegiatan verifikasi inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Mei ini diikuti sebanyak 62 (enam puluh dua) perwakilan undangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang hadir sesuai jadwal urutan untuk mengikuti pendampingan tersebut.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon terhadap hasil Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2024, di mana Provinsi Kalimantan Utara memperoleh predikat Inovatif dengan poin 53,35. Meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 45,86 poin dan berpredikat Inovatif. Meski menunjukkan perkembangan positif dibanding tahun sebelumnya, capaian tersebut masih belum memenuhi target RPJMD Kalimantan Utara dimana tahun 2024 ditargetkan memperoleh predikat Sangat Inovatif. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan predikat inovasi daerah, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan verifikasi inovasi daerah di lingkungan Pemprov. Kaltara ini.

Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan inovasi perangkat daerah yang dilaporkan memenuhi kriteria sebagai inovasi dan memastikan data yang diinput akurat dan relevan. Verifikasi ini merupakan tahap krusial dalam rangkaian persiapan menghadapi *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025, ajang tahunan yang menilai kinerja inovasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. (AS)

MELANGKAH PASTI MENUJU KALTARA BERKELANJUTAN: MERAJUT ASA LEWAT RAD SDGS 2025-2029





Tanjung Selor - Pada Selasa, 24 Juni 2025, suasana Ruang Rapat DPUPR-Perkim Lantai 2 di Tanjung Selor menjadi saksi bisu upaya kolektif tersebut. Pemerintah Provinsi Kaltara, melalui Bappeda dan Litbang, menggelar sosialisasi akbar penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs 2025-2029, sebuah langkah strategis yang menunjukkan komitmen kuat Kaltara dalam merajut asa pembangunan yang inklusif dan lestari.

Acara yang berlangsung secara hibrida, menggabungkan kehadiran luring dan daring via Zoom, ini bukan sekadar rutinitas birokrasi. Ia adalah seruan kolaborasi, sebuah penegasan bahwa agenda global SDGs sejatinya adalah tugas bersama, bukan hanya beban pemerintah.

Menjaring Harapan dari Para Pihak Non Pemerintah (NSA)

Sorotan utama dalam sosialisasi ini tertuju pada pelibatan aktif *Non-State Actor* (NSA). Mufied Azwar, S.Pt., Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda dan Litbang Kaltara, dalam paparannya tak henti menggaungkan pentingnya peran masyarakat sipil, pelaku usaha, filantropi, dan akademisi. “Penyusunan RAD 2025–2029 sedang berlangsung. Kami tidak ingin berhenti pada penyusunan dokumen semata, tetapi mendorong integrasi dalam kebijakan dan penganggaran tahunan,” tegas Mufied.

Sebuah penekanan yang lugas, bahwa RAD bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan panduan nyata yang harus terinternalisasi dalam setiap denyut nadi pembangunan daerah. Arifin Rudiyanto, Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional TPB/SDGs Kementerian PPN/Bappenas, turut memberikan arahan vital. Ia menggarisbawahi bahwa kolaborasi multipihak adalah kunci keberhasilan pencapaian SDGs 2030.

“Komitmen bersama dalam pemanfaatan teknologi, data terbuka, dan penguatan kapasitas sangat ditekankan,” ujarnya, seolah memberi pesan bahwa di era digital ini, data dan transparansi adalah amunisi utama dalam perang melawan ketimpangan dan kerusakan lingkungan.

Memang, Sekretariat Nasional SDGs di pusat telah menyediakan "Matriks Strategi dan Rencana Aksi NSA" yang bersifat *living document.* Ini bukan formalitas. Ia adalah wadah bagi organisasi masyarakat sipil seperti INFID, Muhammadiyah, NU, dan Aisyiah, yayasan filantropi seperti Berdikari *Foundation,* William & Lily *Foundation,* atau Dompet Dhuafa; serta pelaku usaha seperti APP Group dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, untuk secara konkret memetakan kontribusi mereka. Kaltara, dengan sosialisasi ini, berupaya menyerap semangat tersebut, memastikan setiap elemen masyarakat bisa ambil bagian dan merasa memiliki.

Inovasi tak berhenti pada semangat kolaborasi. Dalam sesi sosialisasi, perhatian juga tertuju pada aplikasi SDGsKU. Kholiq, dari Sekretariat SDGs Provinsi, menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk memudahkan para *State Actor* (SA) dan NSA dalam me-review dan menginput capaian indikator. Lebih dari itu, di dalamnya juga terdapat menu penginputan *Best Practice* dari NSA, Filantropi, dan Ormas, bahkan menu pengaduan terkait capaian SDGs. Sebuah langkah maju menuju transparansi dan partisipasi publik yang lebih luas.



Hamdan, sang pengembang aplikasi SDGsKU, menambahkan detail menarik. "Kami sedang mengembangkan aplikasi SDGsKU terbaru yang akan terkoneksi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)," jelasnya. Lebih ambisius lagi, ada upaya untuk menghubungkan data realisasi keuangan sehingga tampilan data realisasi keuangan dapat otomatis termuat.

Ini bukan sekadar mempermudah, tetapi merajut benang merah antara perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas anggaran, yang selama ini kerap menjadi pekerjaan rumah. Sanjoyo dari Setnas SDGs pun mengapresiasi inovasi ini, sembari berharap



aplikasi ini dapat terkoneksi dengan aplikasi monev SDGs Bappenas di tingkat pusat, menciptakan ekosistem data yang terintegrasi. Penyusunan RAD TPB/SDGs 2025-2029 di Kaltara adalah sebuah perjalanan. Ia bukan tanpa tantangan, terutama dalam hal mengintegrasikan target SDGs ke dalam kebijakan dan penganggaran tahunan daerah. Namun, semangat yang terpancar dari kegiatan sosialisasi ini menunjukkan tekad kuat. Kesimpulan dari rapat koordinasi ini jelas: daerah diharapkan tidak berhenti pada penyusunan RAD, tetapi mendorong integrasi dalam kebijakan dan penganggaran tahunan.

Kolaborasi multipihak adalah mantra yang terus digaungkan. Dari Tanjung Selor, Kaltara mengirimkan pesan optimisme. Dengan komitmen bersama dalam pemanfaatan teknologi, data terbuka, dan penguatan kapasitas, mimpi untuk mencapai SDGs 2030 bukan lagi sekadar angka di atas kertas.

Melainkan sebuah realitas yang akan diukir dengan tangan-tangan warganya, menuju Kalimantan Utara yang lebih sejahtera dan lestari. Waktu terus berjalan, dan Kaltara kini melangkah pasti, merajut masa depan berkelanjutan, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.(ROM)

KONREG PDRB KASULAMPUA 2025 : KOLABORASI KAWASAN TIMUR INDONESIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045



Banjarmasin - Pada 12 Juni 2025, Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Sulawesi Maluku Papua (Konreg PDRB Kasulampua) Tahun 2025 sukses dilaksanakan. Forum ini menjadi titik temu penting untuk menyatukan gagasan, memperkuat komitmen, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendorong kontribusi kawasan timur Indonesia terhadap perekonomian nasional.

Dengan mengusung tema "Peningkatan Kontribusi KASULAMPUA terhadap Perekonomian Nasional melalui Transformasi Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif dan Berkelanjutan Didukung Penguatan Digitalisasi". Forum ini melahirkan satu naskah utama bernama Kesepakatan Wasaka yang menjadi landasan kerja bersama lintas wilayah ke depannya. Salah satu pijakan utama dalam kesepakatan ini adalah pentingnya penguatan data statistik, baik yang bersifat dasar maupun sektoral sebagai fondasi pengambilan keputusan.

Dalam era big data dan transformasi digital, wilayah Kasulampua menyadari bahwa kebijakan yang baik hanya mungkin lahir dari data yang andal, terintegrasi, dan dapat diakses lintas sektor. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem data berbasis prinsip Satu Data Indonesia (SDI) akan terus ditingkatkan, termasuk memperkuat peran portal Satu Data Kasulampua yang menggunakan platform *Comprehensive Knowledge Archive Network* (CKAN) sebagai repositori regional.

Hal ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti *(evidence-based policy)* serta mempercepat konektivitas data antara pusat dan daerah. Dengan sinergi ini, perumusan kebijakan akan lebih presisi dalam menjawab kebutuhan daerah serta menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Salah satu misi besar yang diusung adalah mempercepat transformasi ekonomi kerakyatan. Wilayah Kasulampua sangat kaya akan sumber daya alam dan sosial-budaya yang bisa menjadi kekuatan ekonomi bila dikelola dengan prinsip inklusivitas. Pemerintah daerah bersama mitra pembangunan berkomitmen untuk mendorong UMKM bertransformasi ke sektor formal, memperkuat peran koperasi, dan memperluas akses pasar melalui digitalisasi.

Lebih dari itu, transformasi ekonomi yang dikehendaki tidak semata-mata mengejar pertumbuhan angka, melainkan pertumbuhan yang merata dan berkeadilan. Karena itu, penguatan sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri kecil, dan pariwisata lokal menjadi bagian dari agenda besar ini. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah, maka ketahanan ekonomi lokal akan semakin kokoh dan siap menghadapi dinamika global.

Melalui forum ini diharapkan dapat mendorong harmonisasi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah. Selama ini, kesenjangan fiskal sering menjadi tantangan dalam merealisasikan program pembangunan. Oleh karena itu, strategi fiskal kewilayahan dikedepankan untuk memastikan pembiayaan pembangunan lebih efektif dan berpihak pada penguatan kapasitas daerah. Skema inovatif seperti belanja modal yang tepat sasaran, mobilisasi pendapatan asli daerah (PAD), hingga penciptaan pembiayaan kreatif menjadi bagian dari agenda reformasi fiskal ini.

Sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah juga akan terus diperkuat agar arah pembangunan tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi dalam satu kerangka pembangunan nasional. Langkah ini menjadi penting dalam rangka mencapai target-target pembangunan jangka panjang dan menengah yang inklusif dan terukur. Dengan latar belakang wilayah yang kaya akan sumber daya alam, forum ini menegaskan perlunya akselerasi hilirisasi sektor strategis. Kasulampua tidak boleh terus-menerus menjadi pemasok bahan mentah bagi daerah atau negara lain, melainkan harus mampu mengembangkan industri berbasis nilai tambah di dalam wilayahnya sendiri.

Pembangunan kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi baru akan diarahkan untuk menciptakan efek berganda *(multiplier effect),* termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing ekspor. Tak hanya itu, kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah diharapkan menjadi katalisator dalam mempercepat transformasi ekonomi regional. Peran aktif akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil akan terus difasilitasi untuk memastikan bahwa proses pembangunan benar-benar partisipatif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata.

Kepemimpinan Daerah dan Tindak Lanjut Kesepakatan

Forum ini juga menyepakati bahwa Konreg PDRB Kasulampua tahun 2026 akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara, disusul oleh Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2027. Tuan rumah Konreg selanjutnya tidak hanya berperan sebagai penyelenggara teknis, tetapi juga sebagai Sekretariat Konreg yang bertanggung jawab dalam menyusun tema, mengelola sistem data, menyusun kesepakatan dan memfasilitasi publikasi kegiatan secara menyeluruh dan transparan. Dengan mekanisme berkelanjutan ini, diharapkan kesinambungan ide, evaluasi program, dan keberhasilan implementasi dapat terus dikawal bersama dalam jangka panjang.

Kesepakatan Wasaka 2025 bukan hanya produk administratif dari pertemuan teknis, melainkan pernyataan politik pembangunan regional yang kuat. Di tengah tantangan ketimpangan, perubahan iklim, dan disrupsi digital, Kasulampua menyatakan tekad untuk tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi masa depan.

Menjadi tuan rumah Konreg PDRB Kasulampua juga menghadirkan peluang strategis yang signifikan. Tentunya, dengan status tuan rumah memberikan eksposur dalam memperkuat posisi daerah dalam perencanaan pembangunan. Forum ini menjadi ruang promosi potensi unggulan daerah, baik dari sisi sumber daya alam, peluang investasi, hingga keunggulan pariwisata.

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan membuka jalur komunikasi dan kolaborasi yang dapat berujung pada masuknya investasi strategis di sektor hilirisasi, energi terbarukan, ekonomi biru, hingga ekonomi kreatif. Selain itu, efek berganda *(multiplier effect)* juga nyata dirasakan melalui peningkatan konsumsi jasa transportasi, akomodasi, hingga perputaran ekonomi pada sektor UMKM lokal selama forum berlangsung.

Langkah besar telah dimulai, dan tantangannya kini adalah bagaimana komitmen ini diterjemahkan dalam aksi nyata di masing-masing daerah. Dengan kolaborasi yang konsisten, data yang kuat, serta keberanian melakukan inovasi kebijakan, wilayah Kasulampua berpotensi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang. (AA)

GAJAH DI UJUNG HARAPAN
"GAJAH KALIMANTAN: MENJAGA YANG TERSISA"





Gajah di Sebuku, Nunukan Kalimantan Timur
The elephants of Indonesian Borneo (in Sebuku, East Kalimantan)

Tanjung Selor - Di jantung hutan Kalimantan Utara, seekor gajah melangkah perlahan di antara rimbunnya semak dan rintik hujan tropis. Gajah Kalimantan *(Elephas maximus borneensis),* subspesies dari gajah Asia yang hanya ditemukan di Kalimantan Utara (Indonesia) dan Sabah (Malaysia) kini berjuang bertahan hidup di tengah tekanan aktivitas manusia dan kerusakan hutan.

Meskipun berperan penting sebagai spesies payung dalam ekosistem hutan hujan tropis, gajah Kalimantan kini menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidupnya dan telah dikategorikan sebagai spesies terancam punah. Populasi gajah Kalimantan sangat rendah dan terfragmentasi. Di wilayah Sabah, populasi diperkirakan mencapai 1.000 individu dengan kepadatan 0,07/km².

Sementara di Kalimantan Utara, jumlahnya diperkirakan kurang dari 20 individu dengan kepadatan sekitar 0,053/km². Kamera jebak yang dipasang antara tahun 2022–2023 di Sungai Sibuda hanya mendeteksi lima individu jantan, menunjukkan betapa terbatasnya populasi yang tersisa.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada Rabu (7/5) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara memfasilitasi Yayasan Pionir dalam Diskusi Penyusunan Kajian Spasial Habitat dan Koridor Gajah di Kabupaten Nunukan yang dihadiri oleh Mitra Pembangunan, Akademisi dan Perangkat Daerah terkait.

Habitat utama gajah berada di luar kawasan konservasi, mencakup hutan sekunder dengan tutupan kanopi 41–80% serta semak dan hutan campuran. Namun, perubahan penggunaan lahan akibat pembukaan perkebunan dan deforestasi menyebabkan fragmentasi habitat yang signifikan. Analisis tren tutupan lahan menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga 2024, hutan alam di wilayah Tulin Onsoi mengalami penurunan dari 60.661 hektar menjadi 58.491 hektar, dan diperkirakan terus menurun hingga 48.577 hektar pada tahun 2100 jika tren ini berlanjut.



Sejumlah inisiatif telah dilakukan untuk menyelamatkan gajah Kalimantan, mulai dari penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 2018–2028, pengesahan Perda RTRW Kaltara yang melindungi habitat dan koridor gajah, pembentukan Satgas dan Tim Koordinasi Penanganan Konflik Gajah sejak 2013 dan 2018, kerja sama konservasi lintas batas dengan Malaysia (2018–2020), hingga kajian spasial Yayasan Pionir (2025) yang memetakan habitat dan koridor esensial gajah Kalimantan.

MENGAPA GAJAH PENTING?

Gajah Kalimantan adalah spesies payung. Artinya, dengan melindungi mereka, kita melindungi seluruh ekosistem hutan hujan tropis. Kamera jebak mengungkap keberadaan berbagai satwa seperti beruang madu, lutung merah, kijang emas Kalimantan, pelanduk, babi berjenggot, trenggiling, murai batu, kuau raja, dan burung hantu yang bergantung pada ekosistem yang sama.

Kajian spasial yang dilakukan oleh Yayasan Pionir tahun 2025 menyoroti perlunya perlindungan habitat dan koridor gajah yang berada di luar kawasan konservasi. Data spasial digunakan untuk mengidentifikasi kawasan penting, mendukung kebijakan tata ruang, serta menjadi referensi bagi pemerintah, NGO, akademisi, dan masyarakat. Kajian ini merekomendasikan perlindungan habitat secara legal dan fisik, pengelolaan bentang alam berbasis spesies kunci, monitoring jangka panjang, serta edukasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam konservasi gajah



Keberadaan gajah Kalimantan bukan hanya soal keberlangsungan satu spesies, tetapi juga simbol kelestarian hutan tropis dan keanekaragaman hayati di Kalimantan. Tanpa perlindungan yang nyata dan terkoordinasi, populasi gajah yang tersisa akan terus menurun. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menyelamatkan "Raksasa lembut" terakhir di jantung hutan Borneo.(NF)

PERENCANAAN DAN KESEJAHTERAAN ASN YANG SINERGI: FONDASI MENUJU KALTARA YANG BAHAGIA

Tanjung Selor – Dalam upaya memperkuat peran perencanaan pembangunan daerah serta memberikan pemahaman tentang meningkatkan kualitas kesejahteraan ASN masa pensiun dan perlindungan terhadap risiko jaminan pensiun dan perlindungan asuransi, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara menggelar kegiatan strategis yang menyatukan dua agenda penting: Sosialisasi Produk Taspen dan Pembahasan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Kegiatan ini diselenggarakan di Wahana Surya Bermain (WBS), Jelarai Tanjung Selor (3/6), dan diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah pemantapan arah pembangunan daerah melalui pembahasan dokumen Renstra, tetapi juga menjadi forum informasi yang bermanfaat bagi ASN untuk membangun pemahaman, perubahan perilaku, menciptakan dukungan dan partisipasi serta konsesus terhadap manajemen kepegawaian untuk kesejahteraan masa pensiun dan perlindungan terhadap risiko kepada semua ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sesi,dalam sesi pertama perwakilan dari PT TASPEN (Persero) yang dihadiri oleh Bapak Aulia Arkhan (*membership staff* PT Taspen KC. Tarakan) dan Ibu Nabila Qonita Anjani (Taspen *Life Relation Officer* PT Asuransi Jiwa Taspen) menyampaikan berbagai informasi terkait program dan layanan TASPEN.

PT Taspen (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang Asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara. Taspen menawarkan program utama untuk masa tua yang bahagia yaitu Uang Taspen, JKN (Jaminan Kematian), dan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja).

Tidak hanya menawarkan program utama, PT Taspen juga memberikan informasi terkait Program Jaminan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, Layanan digitalisasi melalui aplikasi TASPEN Smart, Proses klaim manfaat dan simulasi pensiun, serta kemudahan Produk Taspen Life dan Top Up manfaat sehingga pada saat menjelang memasuki masa pensiun ASN mendapatkan kelebihan dana dan manfaat dari program yang ditawarkan.







Mencapai masa pensiun yang bahagia dan sukses bukanlah semata-mata urusan finansial, tetapi masalah finansial ini merupakan fondasi yang harus dibangun sebelum masalah-masalah lain pada waktu pensiun dapat diatasi. Sosialisasi ini diharapkan juga dapat meningkatkan literasi ASN terhadap manfaat yang dimiliki selama masa aktif hingga masa pensiun, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap layanan pemerintah di bidang kesejahteraan pegawai.

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang terarah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan pentingnya perencanaan yang berkualitas masa kini dan mendatang sebagai pintu masuk menuju keberhasilan pembangunan daerah. Melalui pendekatan berbasis data dan partisipatif, perencanaan daerah kini tidak hanya menjadi dokumen administratif, namun juga alat strategis perubahan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Suasana Santai, Dialog Terbuka

Pada sesi kedua, Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara memimpin pembahasan Renstra 2025–2029 dengan tujuan memberikan masukan dan saran untuk setiap bab, meliputi pendahuluan, gambaran pelayanan dan isu strategis, tujuan dan strategi kebijakan, program dan kinerja, hingga kesimpulan dan rencana tindaklanjut.

Perencanaan yang baik adalah setengah dari keberhasilan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyadari bahwa akselerasi pembangunan hanya akan berhasil bila dimulai dari perencanaan yang presisi, pelaksanaan yang akuntabel, dan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Melalui sinergi program, transformasi ASN, dan komitmen keberlanjutan, gerbang kesuksesan pembangunan daerah telah dibuka lebar

Merujuk pada implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, menyebutkan bahwa Perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan dilaksanakan secara simultan dan terkoordinasi. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan bersifat sektoral yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Selanjutnya Rencana Strategis Perangkat Daerah dimanfaatkan untuk menjadi rumusan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Pembahasan Renstra Bappeda dan Litbang Tahun 2025-2029 sangat luas dan komprehensif, mencakup berbagai aspek perencanaan strategis untuk jangka waktu 5 tahun. Pembahasan Renstra berfokus pada sasaran, strategi, kebijakan pendanaan, program, dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilakukan untuk untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis (isu strategis global, nasional, regional dan internal) sehingga dapat mewujudkankan kinerja yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Pemilihan lokasi di Wahana Surya Bermain, Jelarai Tanjung Selor, memberikan nuansa baru dalam dinamika kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bappeda dan Litbang. Kegiatan yang digelar di tengah kawasan agrowisata seluas 1,8 hektare ini sengaja dirancang untuk membebaskan para pegawai dari rutinitas kerja di balik meja, sekaligus mendorong produktivitas melalui diskusi dan kolaborasi di ruang terbuka yang asri dan hijau.

Kawasan ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga mengusung konsep agrowisata yang menggabungkan edukasi, lingkungan, dan kenyamanan alam. Bagi pengunjung yang gemar memancing, tersedia kolam pancing yang dikelola secara baik sebagai salah satu daya tarik utama. Selain itu, beragam wahana permainan juga disediakan untuk memenuhi kebutuhan hiburan keluarga dan anak-anak.

Dengan memadukan suasana alam yang sejuk dan fasilitas pendukung yang memadai, Wahana Surya Bermain menjadi alternatif destinasi produktif sekaligus rekreasi yang edukatif, sekaligus membuktikan bahwa kerja keras dan kenyamanan alam bisa berjalan beriringan. Seluruh ASN dari berbagai bidang dapat berinteraksi lebih terbuka, berdiskusi, dan menyampaikan masukan demi perencanaan yang lebih baik dan layanan yang lebih optimal ke depannya.

Perencanaan bukanlah sekadar rutinitas tahunan, melainkan kompas pembangunan. Dengan komitmen kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, perencanaan yang baik akan membuka gerbang kemajuan dan menciptakan transformasi nyata tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara. (RTY)





SINERGI BERSAMA UNTUK OPTIMALISASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Tanjung Selor – Sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan keterbukaan informasi publik, pada hari Selasa (6/5) dilaksanakan kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Bappeda dan Litbang Kaltara yang dihadiri oleh pejabat struktural dan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda dan Litbang. Hadir sebagai narasumber Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Kaltara, Berlanta Ginting, S.E., M.Div.

Mochamad Sarkawi, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam sambutannya mewakili Kepala Bappeda dan Litbang mengatakan bahwa pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi terkait Standar Layanan Informasi Publik.

Hasil evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bappeda dan Litbang pada tahun 2024, terdapat banyak aspek yang memerlukan perbaikan. Untuk itu dengan kegiatan ini diharapkan Komisi Informasi memberikan masukan untuk peningkatan pelayanan informasi publik di Bappeda dan Litbang.

Sementara itu, Berlanta Ginting dalam paparannya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Bappeda dan Litbang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan daerah. Keterbukaan informasi dari instansi ini sangat penting agar publik dapat mengakses, memahami, dan terlibat dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, tim dari Komisi Informasi juga melakukan evaluasi terhadap ketersediaan dan kualitas layanan informasi publik di Bappeda dan Litbang. Beberapa catatan diberikan terkait penguatan fungsi PPID, penyusunan daftar informasi publik, serta pembuatan daftar informasi yang dikecualikan.

Diharapkan melalui kegiatan ini, Bappeda dan Litbang semakin siap dalam menjalankan kewajibannya sebagai Badan Publik yang informatif, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang diamanatkan undang-undang dan terus berbenah dalam mendukung keterbukaan informasi demi mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (AS)

MENYUSUN ARAH MASA DEPAN : PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN, KOMPAS MENUJU INDONESIA EMAS

Samarinda - Bukan hanya soal angka, grafik, atau statistik. Pembangunan kependudukan adalah tentang manusia—tentang anak-anak yang bersekolah, ibu yang mendapat layanan kesehatan reproduksi, dan para lansia yang dihormati hak hidupnya. Di balik setiap keputusan kebijakan, ada harapan yang terpatri dalam data. Dalam konteks inilah, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 disusun. PJPK bukan sekadar lampiran tambahan dalam tumpukan dokumen perencanaan, melainkan sebuah *blueprint* yang menjadi fondasi dalam membangun manusia Indonesia yang tangguh, cerdas, dan sejahtera.

Lima Sasaran Strategis: Pilar Kependudukan Berkelanjutan

PJPK didesain dengan pendekatan *living document* yang mengusung lima sasaran utama. Masing-masing sasaran ini membentuk rangka kerja menyeluruh, menyentuh dimensi kuantitatif, kualitatif, dan tata kelola kependudukan:

Pengendalian Kuantitas Penduduk. Sasaran ini menyoroti angka fertilitas, termasuk TFR dan ASFR (khusus remaja usia 15–19 tahun).
Peningkatan Kualitas Penduduk. Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi.
Pembangunan Keluarga. Menyoroti peran keluarga sebagai unit dasar pembangunan.
Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk. Ini berkaitan dengan keadilan spasial dan pengurangan beban Pulau Jawa.
Integrasi Data dan Administrasi Kependudukan. Melibatkan cakupan akta kelahiran, kematian, pernikahan, dan kepemilikan dokumen seperti NPWP dan NIK.



Langkah Provinsi Kalimantan Utara: Perlahan tapi Pasti

Dari seluruh provinsi di Kalimantan, Kalimantan Utara menempati posisi yang unik. Wilayah ini mencakup 75 ribu km², dengan 55 kecamatan, dan populasi sekitar 749 ribu jiwa. Kaltara merupakan beranda depan NKRI yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga kebutuhan akan pembangunan kependudukan yang berdaulat dan inklusif menjadi krusial. Dalam pemaparan oleh Bappeda dan Litbang Kaltara, disebutkan bahwa dari 30 indikator PJPK, sudah terdapat 23 indikator yang berhasil diinternalisasi ke dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Meski demikian, upaya harmonisasi terus dilakukan, terutama pada sasaran terkait kualitas pendidikan dan kesehatan, dan pengasuhan keluarga serta lansia.

Progres ini sekaligus menunjukkan bahwa Kaltara berada dalam kategori “sangat baik”, dengan skor internalisasi saat ini berkisar pada 23 indikator. Untuk melengkapi sisanya, Pemprov. berkomitmen melakukan integrasi melalui review RPJMD, Renstra PD dan konsultasi lintas sektor menjelang penetapan dokumen final pada Agustus 2025. (ROM)

“

Jadilah **teladan** dalam **Sikap** dan **Perbuatan**

Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum



SEKILAS INFO

« 15 APRIL 2025

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Mochamad Sarkawi menjadi narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tana Tidung untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Musrenbang dirancang sebagai proses yang partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan setiap usulan dari masyarakat didengar.

« 16 APRIL 2025

2. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Awal (Ranwal) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sukses dilaksanakan. Verifikasi Ranwal Renja adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Bappeda dan Litbang bersama BKAD, Biro Pembangunan dan Biro Organisasi untuk memastikan keselarasan Renja Perangkat Daerah sudah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

« 16 APRIL 2025

3. Plt. Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan Sriwati, ST menjadi narasumber pada Workshop Petunjuk Teknis Integrasi AIDS, TBC, dan Malaria (ATM), serta Kebijakan Nasional Terkait ATM Tingkat Provinsi di Kalimantan Utara yang berlangsung di Hotel Grand Pangeran Khar, Tanjung Selor. Workshop diselenggarakan untuk mengintegrasikan Perencanaan & Penganggaran ATM ke dalam Dokumen Perencanaan daerah dan meningkatkan kualitas Perencanaan & Penganggaran ATM di Daerah.

« 25 APRIL 2025

4. Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius S.Hut. turut hadir mendampingi Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat meninjau langsung lokasi tempat berdirinya "Sekolah Rakyat" yang terletak di Desa Gunung Sari Kabupaten Bulungan. Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai jawaban atas ketimpangan akses pendidikan di wilayah – wilayah Tertinggal, Terpencil dan Terluar (3T).

« 29 APRIL 2025

5. Wakil Gubernur Ingkong Ala, SE, M.Si melakukan peninjauan jalan yang menghubungkan Tanjung Selor dengan sejumlah desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur khususnya akses jalan menuju Kawasan Industri Tanah Kuning - Mangkupadi. Didampingi Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si dan Kepala Bapedda Litbang Kaltara Bertius, S.Hut, Wagub Ingkong melihat langsung kondisi sejumlah jalan yang mengalami kerusakan.




MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2026




WORKSHOP PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI
DAN KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT ATR
DI KALIMANTAN UTARA





MENAKAR JASA LINGKUNGAN MANGROVE UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN HIJAU

Meningkatnya ancaman akibat perubahan iklim memberikan perhatian yang besar pada ekosistem mangrove pada dua dekade terakhir. Hal ini berkaitan dengan jasa lingkungan yang diberikan ekosistem mangrove namun nilai tersebut seringkali luput dalam perhitungan perencanaan pembangunan. Banyak studi menunjukkan fungsi penting ekosistem mangrove terutama sebagai penyimpan cadangan karbon, pelindung pesisir dari ombak dan abrasi dan sumber penghidupan masyarakat setempat.

Kajian valuasi mangrove yang dilaksanakan oleh GIZ pada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara memberikan gambaran pentingnya jasa ekosistem dari keberadaan ekosistem tersebut. Survei dilakukan di 14 desa dalam kawasan Delta Kayan Sembakung (DKS) atau 53,5% total area mangrove



Kegiatan masyarakat di ekosistem mangrove

dari keseluruhan wilayah DKS. Informasi yang digali terkait fungsi mangrove, manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat serta ancaman terhadap ekosistem mangrove.

Tercatat nilai total *(total value)* mencapai hampir Rp.30 Triliun per tahun dari komponen nilai guna langsung sebesar Rp.862 juta per tahun terutama dari perikanan yang berasal dari mangrove. Sedangkan nilai guna tak langsung (jasa ekosistem) sebesar Rp.24,6 Triliun per tahun untuk perlindungan pantai, Rp.4,1 Triliun per tahun untuk filter air, dan Rp.1,2 Triliun per tahun sebagai penyerap karbon. Melalui metode biaya penggantian dan pendekatan transfer manfaat, terlihat jelas pentingnya peran mangrove dalam mendukung kehidupan masyarakat pesisir serta kesehatan ekosistem pesisir.

Dalam kajian tersebut terungkap masyarakat menghargai keberadaan mangrove yang mendukung kehidupan mereka. Upaya rehabilitasi dan perlindungan mulai digalakkan berbagai pihak baik dari kelompok masyarakat, pemerintah serta mitra pembangunan. Namun, masih terdapat kesenjangan partisipasi dalam perlindungan mangrove seperti belum ada tata kelola pada tingkat lokal, kurangnya keterlibatan pemerintah daerah serta persoalan pemberdayaan masyarakat.



Persemaian mangrove di dalam tambak (Pulau Piking)

Tidak bisa dipungkiri, konflik kepentingan juga terjadi di ekosistem mangrove. Ancaman keberadaan mangrove adalah alih fungsi menjadi tambak ekstensif, sekitar 60% dari area mangrove. Diperlukan langkah strategis untuk menjembatani beragam kepentingan para pemanfaat mangrove, mengingat ekosistem ini merupakan aset ekonomi sekaligus penyangga kehidupan pesisir.

Inisiatif perencanaan terpadu berbasis ekosistem mangrove yang telah dimulai di Provinsi Kalimantan Utara perlu terus diperkuat dan dikawal guna mendukung arah pembangunan yang berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah bagaimana menerjemahkan nilai ekonomi dari fungsi tidak langsung mangrove menjadi kebijakan yang konkret, adil, dan berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. (GIZ)



Pembukaan baru tambak dengan mematikan pohon mangrove (Desa Liagu)



ECO-CHIC: RAYAKAN KECANTIKAN ALAM DALAM SETIAP HELAINYA

[Inovator : PT. ECO CHIC]

Kalimantan Utara memiliki garis pantai yang luas dengan hutan mangrove yang menjadi salah satu ekosistem penting di wilayah ini. Menurut data dari Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) luas hutan mangrove di Kota Tarakan mencapai sekitar 21 hektar pada tahun 2023. Dilansir dari Kompas.id lebih dari 148.000 hektar mangrove di Kalimantan Utara terdegradasi hal ini menyebabkan intrusi air laut di beberapa titik yang mengakibatkan kondisi air di daratan yang dekat dengan pesisir menjadi payau dan asin.

Selain itu, kondisi ini menyebabkan abrasi, sulitnya penyerapan karbon dan perubahan iklim. Di sisi lain, industri tekstil dan pertanian di Kota Tarakan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan berkelanjutan, dan masih bergantung pada bahan kimia yang merusak lingkungan.

Inovasi pemanfaatan limbah mangrove sebagai pewarna pakaian dan pupuk organik di Kota Tarakan, Kalimantan Utara muncul sebagai upaya untuk menjawab tantangan ini. Dengan melimpahnya sumber daya mangrove, ada peluang besar untuk mengubah limbah yang selama ini terabaikan menjadi produk bernilai tinggi. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan alternatif pertanian yang lebih ramah lingkungan sejalan dengan perkembangan sektor pertanian dan peternakan di daerah ini.

Eco-Chic, merupakan produsen pakaian yang didirikan pada Agustus 2023. Eco-Chic mengusung konsep berkelanjutan dengan memanfaatkan pewarna alami dari limbah mangrove sebagai bagian dari proses produksi pakaian. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap dampak lingkungan dari industri tekstil, Eco-Chic berkomitmen untuk menciptakan produk yang tidak hanya modis tetapi juga ramah lingkungan.

Penerapan inovasi ini diharapkan tidak hanya memberikan solusi atas permasalahan limbah dan kerusakan ekosistem, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja baru dan pengembangan industri ramah lingkungan. Melalui pengelolaan yang tepat, limbah mangrove dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi sektor tekstil dan pertanian, serta mendukung upaya konservasi lingkungan di Kalimantan Utara.





BIORHYTM: MONITORING KESEHATAN JANTUNG MELALUI INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA

[Inovator : April Yansa]

Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan salah satu bentuk utama dari penyakit kardiovaskular dan menjadi perhatian penting dalam ranah penyakit tidak menular (PTM). PJK disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah koroner, yang mengakibatkan aliran darah ke otot jantung terhambat. Urgensi penanganan PJK sangat tinggi mengingat besarnya angka kematian akibat penyakit ini.

Salah satu solusi inovatif yang dapat diterapkan adalah pengembangan BioRhythm. Alat ini dirancang untuk memantau kondisi tanda-tanda vital pasien secara *real-time,* memungkinkan deteksi dini dan penanganan cepat untuk kondisi kardiovaskular seperti serangan jantung.



Fungsi utama alat ini meliputi pemantauan detak jantung, dan saturasi oksigen yang sangat penting dalam deteksi dini dan monitoring penyakit jantung. Dengan sifatnya yang portabel, alat ini dapat digunakan di lokasi-lokasi terpencil dan memungkinkan tenaga medis untuk mengambil keputusan klinis yang tepat berdasarkan data real-time.

Dengan harga yang lebih terjangkau, BioRhythm dapat didistribusikan lebih luas dan memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih merata di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Untuk mewujudkan pengembangan dan implementasi BioRhythm, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, institusi kesehatan, dan sektor swasta.

PT Pertamina EP Tarakan Field sebagai salah satu perusahaan yang memiliki peran dalam pengembangan layanan kesehatan di wilayah perbatasan dapat menjadi mitra strategis dalam pengadaan alat ini. BioRhythm memungkinkan pemantauan kesehatan jantung secara berkala, sehingga perubahan kondisi dapat terdeteksi lebih dini dan penanganan medis dapat dilakukan dengan cepat.

Inovasi BioRhythm tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memiliki dampak positif bagi sistem kesehatan secara keseluruhan. Dengan adanya alat ini, beban kerja rumah sakit dapat berkurang karena banyak pasien dapat melakukan pemeriksaan awal di rumah. Selain itu, deteksi dini dan penanganan yang tepat dapat mengurangi biaya perawatan jangka panjang.



TRANFORMASI LAYANAN MAIN HATI PERPUSTAKAAN DAERAH KEPENDAYAN TARAKAN

[Inovator : Dharmawati]

Memasuki tahun 2022 Perpustakaan Nasional menggulirkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini bertujuan peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial. Dengan semangat ingin mentransformasi layanan perpustakaan, Perpustakaan Daerah Kependayan Kota Tarakan melaksanakan program TPBIS. Memperhatikan kebutuhan pemustaka dan masyarakat akan perpustakaan, maka lahirlah Transformasi Layanan MAIN HATI.

MAIN HATI adalah akronim dari kalimat Manajemen Intimung Sahabat Literasi. Secara spesifik Transformasi Layanan MAIN HATI adalah sebuah inovasi transformasi perpustakaan berbasis kebutuhan masyarakat, dengan strategi kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat melalui produk literasi berupa *soft skill,* barang dan jasa.

Adapun layanan yang ada di dalam inovasi Main Hati yaitu :

Sehati. Sehati adalah Sistem Digitalisasi Layanan Informasi,

Sepenuh Hati. Adalah layanan informasi berupa sarana aula berkegiatan untuk komunitas.

Berbagi Hati. Adalah layanan kolaborasi dan sinergi dengan komunitas dan Lembaga.

Berbesar Hati. Jika Sehati, Sepenuh Hati dan



Berbagi Hati dilakukan di perpustakaan, maka layanan Berbesar Hati adalah layanan jemput bola.

Setelah 2,7 tahun program ini dilaksanakan banyak dampak – dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat pemustaka salah satunya adalah pada tahun 2023 Tingkat Gemar Membaca (TGM) di Kota Tarakan tertinggi di Kalimantan Utara, dan peringkat 18 dari 93 Kabupaten dan Kota di Indonesia. Dengan Nilai Tingkat Gemar Membaca 70, 93.

Nilai TGM Kota Tarakan ini diatas rata-rata nilai TGM Kalimantan Utara 69.31 dan rata-rata TGM nasional 66,77. (Sumber, Paparan Ekspos Kajian TGM 2023, Perpusnas). Transformasi layanan MAIN HATI ini bisa terus berkembang karena kekuatan tim bidang perpustakaan Daerah Kependayan Kota Tarakan, dengan pembagian kerja yang jelas, terus menjadi personal yang pembelajar dan mau terus meningkatkan kapasitas diri.

"Mari kita terus memperkuat Persatuan demi mewujudkan Pembangunan ."

Ingkong Ala, S.E., M.Si
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA





PROLIFERASI WANGI KOPI: MODERNITAS, EKONOMI, RUANG SOSIAL BARU DAN JEJAK EKOLOGIS

[Penulis : Retno Sawitri Listyabratarini[1]]

Kopi semula merupakan komoditas siasat dagang VOC *(Verenigde Oostindische Compagnie)* yang dibawa ke Indonesia (Pulau Jawa) pada sekitar tahun 1696. Saat itu yang dibawa adalah Kopi Malabar, dari India, dengan jenis Arabika, yang diujicoba tanam di Batavia tepatnya di Kedawung. Setelah jenis Arabika dan Liberika mengalami kegagalan tanam, VOC mendatangkan varietas lain dengan jenis Robusta *(Coffee cabephora).* Varietas ini lebih sesuai dibudidayakan di Indonesia karena lebih tahan hama penyakit, pemeliharaan ringan, produktivitas tinggi dan dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah (1.000 mdpl). Selain di Jawa, Robusta dapat tumbuh dengan baik di Sulawesi, Sumatera, Bali dan beberapa pulau lain.

Robusta mengantar Belanda pada kesuksesan yang menjadikan Belanda mampu memonopoli pedagangan kopi di Eropa dan beberapa bagian dunia. Dataran Tinggi Gayo (Aceh) menjadi salah satu lahan kopi terluas di Asia Tenggara yang terkenal di dunia hingga hari ini dengan varian Kopi Gayo. Selain Dataran Tinggi Gayo, lahan kopi terluas ada di Jawa yang kemudian terkenal dengan varian Kopi Java.

Kopi dan Ngopi

Saat ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia menempati posisi keempat sebagai produsen kopi terbesar setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. Selain kualitas, keistimewaan kopi Indonesia ada pada aneka macam variasi citarasanya.

Dari 3 (tiga) jenis kopi yang dibudidayakan, Arabika, Liberika dan Robusta, muncul varian Arabika Gayo Sumatera, Arabika Kintamai Bali, Arabika Ijen Raung, Arabika Toraja, Arabika Flores Bajawa, Robusta Lampung, Robusta Jawa Dampit, Robusta Temanggung, Robusta Pupuan Bali, Robusta Flores, Toraja, Liberika Rangsang Meranti Riau, Liberika Libtukom Jambi dan Excelsa Tanjung Jabung Barat Jambi, Excelsa Wonosalam Jawa. Ngopi atau budaya yang timbul dari aktivitas meminum kopi, merupakan tradisi yang sejak lama melekat pada masyarakat Indonesia. Kopi menjadi minuman wajib sehari-hari masyarakat baik dalam internal keluarga maupun untuk penghormatan bagi orang luar atau tamu yang berkunjung ke rumah. Sebagian masyarakat menjadikan kopi sebagai minuman wajib di pagi hari bahkan untuk mengganti sarapan karena dianggap mampu menjadi penambah energi saat memulai hari.

Kopi juga menjelma menjadi bahasa universal komunitas, dimana dalam perkumpulan sosial baik formal maupun informal, kopi merupakan sajian yang wajib ada. Sehingga kopi tidak hanya menjadi minuman pelengkap tetapi merupakan pusat dalam menghadirkan ruang publik dan sosial. Dan ngopi bukan hanya sekedar menikmati secangkir kopi tetapi juga merupakan ruang interaksi sosial,

pertukaran informasi dan membangun relasi.

Anthony Giddens mengemukakan bahwa kehidupan modern merupakan dunia yang tidak terkendali, selalu ada proses perubahan yang terjadi dalam skala besar dan cakupan yang lebih dalam. Terjadinya perubahan makna 'minum kopi' merupakan keniscayaan dalam upaya penyelarasan komunitas atas perubahan dan perbedaan zaman yang terjadi, sekaligus bentuk bertahan sebuah aktivitas yaitu 'ngopi'. Pada saat ini, fenomena orang duduk di warung kopi sudah berubah, demikian pula dengan pola interaksinya. Beberapa tahun terakhir sebelum teknologi digital berkembang begitu pesat kita masih mudah menemukan diskusi-diskusi, interaksi antar individu diwarung kopi terjadi demikian masif.

Tetapi hari ini, interaksi tersebut mulai menurun digantikan komunikasi virtual melalui teknologi digital. Perubahan ini terjadi tidak terlepas dari pengaruh digital itu sendiri, orang-orang yang duduk di warung kopi tidak lagi melulu berinteraksi secara verbal atau berdiskusi, pengunjung banyak asik dengan teknologi yang ada di tangan menjadi ruang publik sebagai medium komunikasi, tetapi berubah fungsi menjadi simbol gaya hidup yang terus menerus diproduksi oleh teknologi digital, akibatnya orang ke warung kopi tidak hanya untuk meminum kopi tetapi untuk menunjukkan eksistensinya sebagai manusia modern. Hal ini di fasilitasi dengan baik oleh berbagai fasilitas dan inovasi yang dilakukan oleh warung kopi itu sendiri, yaitu dengan memberikan fasilitas internet, mengubah nama warung kopi menjadi kafe dan lain sebagainya.





Warung Kopi Indra
Jl. Yos Sudarso, Tarakan

Dampak lainnya dari berubahnya pola interaksi dan fungsi warung kopi adalah alih fungsi warung kopi dari tempat minum kopi dan ruang interaksi menjadi tempat kerja baru. Akibatnya interaksi dan komunikasi menjadi semakin terdistorsi karena orang ke warung kopi bukan untuk minum kopi tapi untuk bekerja sambil menikmati internet gratis.

Ngopi di Kalimantan Utara

Budaya ngopi sudah menjadi sudah menjadi bagian penting dari masyarakat Kalimantan Utara. Modernitas menikmati kopi yang terjadi secara umum di Indonesia juga terjadi di Kalimantan Utara. Terjadi pergeseran yang awalnya minum kopi di warung kopi tradisional, kini mereka memilih minum kopi di kedai kopi modern, estetik dan bergengsi serta sebagian yang lain memilih kopi cepat saji *(on the go coffee)*.

Bila dulu yang pergi ke warung kopi adalah bapak-bapak atau para pria, kini para perempuan juga marak menikmati kopi di kedai-kedai kopi kekinian. Di Kalimantan Utara khususnya di Tanjung Selor, berkembang tiga jenis tempat minum kopi, dimana tiga jenis tempat ini memiliki karakter yang berbeda.

Warung Kopi. Kita mengenalnya dengan istilah warkop. Warung tradisional sederhana yang menjual kopi, menu sarapan seperti nasi kuning, bubur, mie, telur setengah matang. Juga kudapan seperti cakue, bapau, untuk-untuk (roti goreng isi). Warung dengan konsep rumahan, tempat masyarakat singgah, berkumpul, berbincang, istirahat sejenak dari aktivitas harian.

Sederhana tanpa mengedepankan unsur estetika. Pengunjung bisa duduk berlama-lama disini. Beberapa warung kopi tradisional legendaris yang terkenal hingga saat ini ada Warung Kopi Indra/ Aseng (Tarakan), Warung Ria, Tomak, Lestari (Tanjung Selor), juga Idung Merah (Malinau).

Kedai Kopi Modern-Tematik. Tempat ngopi yang biasa dijumpai pada kawasan perdagangan di perkotaan, yang menonjolkan desain arsitektural dan desain interior yang estetik dan nyaman. Biasa disebut dengan *coffee shop,* juga cafe. Bisa juga berupa tempat ngopi yang mengusung tema-tema tertentu seperti *rustic, natural garden, waterfront, vintage* dan sebagainya. Jenis biji kopi yang ditawarkan beragam, teknik penyeduhan dan penyajian juga beragam.

Untuk menjangkau pengunjung lebih luas kedai ini menawarkan juga menu *non coffee* serta aneka kudapan. Tak jarang juga menggelar hiburan seperti *live music* pada hari-hari tertentu. Didukung akses Wifi yang memadai tempat kopi jenis ini sering dijadikan tempat kerja baru bagi para pekerja muda atau mahasiswa.



Kattarakopi
Jl. Jelarai Raya, Tj. Selor Hilir

Budaya baru yang akhirnya muncul di kedai kopi tanpa menghilangkan esensi sosial.

Beberapa yang terkenal adalah Kattarakopi, Titik Koma, Naoka Space, Bean Laden, Saat Seduh, Labolong (Tanjung Selor), Kopi Tubu, Cafe Asmara, Dialogue, Kopi Kael (Malinau), Kopi Mood (Nunukan), Warkop Catur, My Boss Town Cafe (Tana Tidung), Galileo, Cascara, Bius, Indeks Coffee House, The Uncle (Tarakan).



Kopi *on the go.* Tempat ngopi jenis ini mulai banyak muncul beberapa tahun terakhir yang membuat tempat ngopi menjamur dimana-mana, karena tidak menuntut batasan fisik berupa ruang yang masif. Dijumpai dalam bentuk *booth*/stand kopi dan gerobak sepeda berpendingin.
Biasa disebut kopi *on the go,* merujuk pada istilah dimana masyarakat bisa membeli dan membawanya pulang atau dinikmati di tempat lain.



Mudah dijumpai di sudut kota, di halaman toko, halaman rumah, trotoar pada kawasan perdagangan atau pada tempat-tempat publik seperti alun-alun, taman kota, perkantoran, sekolah dan tempat lain. Inovasi ini digemari karena menawarkan ngopi dimana saja, cepat, praktis dan murah.

Dampak dari Merebaknya Aroma Kopi

Harumnya aroma kopi dan popularitas ngopi dewasa ini, perlu kita melihat lebih jauh dampak dan konsekuensi-konsekuensi apa saja yang mungkin muncul dibaliknya dan harus menjadi perhatian.

1. Dampak ekonomi
- Harga kopi bubuk meningkat seiring dengan peningkatan permintaan kopi robusta nasional. Tingginya permintaan terhadap kopi menjadikan kopi sebagai penyumbang inflasi di Tahun 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara mencatat Kopi bubuk sebagai salah satu dari 10 komoditas penyumbang inflasi di Kalimantan Utara. Kopi bubuk menyumbang inflasi sebesar 0,16 persen di Tanjung Selor dan 0,11 persen di Prov. Kalimantan Utara.
- Berkembangnya kedai kopi modern dan kedai *kopi on the go* membuka lapangan pekerjaan, mendorong pergerakan ekonomi lokal.
- Ekonomi kreatif juga bangkit dari berkembangnya budaya ngopi, dengan tumbuhnya konsep-konsep kedai kopi dan kolaborasi unik yang menggabungkan seni, budaya dan kuliner, mengkombinasikan produk kopi lokal dengan makanan khas daerah.

2. Dampak sosial
- Popularitas dan kesuksesan kopi belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani kopi terutama petani kopi di perkebunan kecil. Petani dihadapkan pada persaingan pasar yang ketat, ketidakadilan dalam rantai pasok dan harga yang tidak stabil.
- Perubahan penggunaan ruang, akibat perubahan aktifitas yang semula dari hunian menjadi komersial/ruang usaha, memberi pengaruh terhadap kenyamanan, sosial dan aspek lingkungan.
- Menjamurnya kedai kopi mendorong perubahan aktifitas sosial. Timbulnya klaster-klaster keramaian baru yang membawa dampak sosial, berupa gangguan privasi berkaitan dengan ruang personal dan berkurangnya kualitas lingkungan. Timbul pula gangguan aksesbilitas baik sirkulasi, parkir, pedestrian akibat kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari pemilik usaha.

3. Dampak lingkungan
- Tingginya permintaan kopi dapat mendorong perluasan areal perkebunan kopi, baik milik rakyat maupun perusahaan. Pengelolaan perkebunan yang tidak berkelanjutan memicu deforestasi, hilangnya habitat satwa liar, degradasi tanah.
- Penggunaan gelas plastik sekali pakai, meningkatkan timbulan sampah dan gangguan lingkungan akibat sampah yang tidak dapat terurai. Penggunaan *papercup* mendorong penebangan kayu untuk bahan baku kertas.
- Limbah ampas kopi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Popularitas dan modernitas ngopi harusnya dibarengi dengan modernitas kesadaran dan perilaku penikmatnya akan isu-isu yang dimungkinkan timbul, terutama dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemerintah daerah perlu menguatkan peran kontrol dalam mengendalikan dan mengelola dampak dan risiko, tidak hanya mengambil keuntungan yang muncul dari popularitas yang berkembang di masyarakat. Ada tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan yang ikut tersaji dalam kenikmatan yang kita rasakan.

Perlu perumusan langkah nyata yang dilakukan antara pemerintah, pemilik usaha dan masyarakat untuk mengurangi dampak-dampak yang timbul, dilakukan secara konsisten kemudian di evaluasi pelaksanaannya. Menikmati kopi dengan berkesadaran, menikmati dengan bertanggung jawab sehingga tercapai keseiembangan antara manusia, alam dan ekonomi.

[1] Penelaah Teknis Kebijakan, Bappeda dan Litbang Kaltara

BALOY MAYO

ADAT TIDUNG









Tarakan, kota kecil yang terkenal dengan sejarahnya sebagai penghasil minyak, ternyata juga menyimpan pesona budaya yang menarik untuk dieksplorasi. Salah satunya adalah Baloy Adat Tidung yang berada di kawasan Juwata. Lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Bandara Juwata membuat tempat ini mudah dijangkau.

Cukup ikuti arah utara dari Bandara Juwata, belok kiri ke Jl. Aki Babu, lalu belok kiri lagi sekitar 100 meter. Hanya butuh waktu sekitar 8 menit atau 4,1 kilometer untuk sampai ke sana. Jadi, kalau kamu transit di Tarakan, sempatkan sejenak untuk mampir ya!

Baloy ini bukan sembarang rumah adat. Nama lengkapnya Baley Amiril Pengiran Djamaloel Qiram, atau dikenal juga sebagai Baloy Mayo Djamaloel Qiram. Diresmikan pada Agustus 2006 oleh Gubernur Kaltim saat itu, Drs. Jurnalis Ngayoh, MM, bangunan ini didirikan di atas lahan seluas sekitar 16 hektar melalui dana pribadi Kepala Adat Besar Dayak Tidung, Mochtar Basry Idris. Dari segi arsitektur, Baloy Mayo dibangun dengan gaya rumah panggung tradisional menggunakan bahan utama kayu ulin—kayu khas Kalimantan yang terkenal sangat kuat dan tahan terhadap cuaca ekstrem, bahkan disebut-sebut sebagai "kayu besi".

Uniknya, kayu ini justru semakin kuat jika terendam air. Bangunan ini pun disematkan sentuhan modern, menjadikannya unik namun tetap sederhana dibandingkan rumah adat lainnya. Salah satu daya tarik utama Baloy adalah kolam besar yang terletak di bagian belakang bangunan. Kolam ini bukan sekadar untuk hiasan. Di tengah kolam terdapat dua bangunan penting: Lubung Kilong, tempat pertunjukan seni tradisional seperti Tarian Jepin, dan Lubung Intamu, ruang pertemuan besar untuk acara adat seperti pelantikan pemangku adat atau musyawarah masyarakat.

Jadi, saat berkunjung ke Baloy Adat Tidung, kamu nggak cuma melihat bangunan tua, tapi juga merasakan langsung kehidupan budaya masyarakat Tidung yang masih lestari. Mayoritas masyarakat Tidung beragama Islam, sehingga adat yang diterapkan juga terpengaruh oleh tradisi Melayu.

Baloy Adat Tidung buka setiap hari dari pukul 07.30 hingga 17.00 WITA. Tiket masuknya pun sangat ramah di kantong, cuma Rp10.000 per orang, dan sudah termasuk pakan untuk ikan dikolam. Murah meriah, tapi kamu bisa bawa pulang pengalaman budaya yang luar biasa.

Jadi, kalau kamu ke Tarakan, jangan lupa mampir ke Baloy Adat Tidung. Tempat ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga simbol kebanggaan dan keberlanjutan budaya masyarakat Tidung yang patut kita lestarikan. Yuk, eksplor!

Teks dan Foto : Ady Setiawan



Baloy Mayo
Jl. Aki Babu, Kel. Karang Anyar Pantai,
Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara.

''BUKNYA MENCAGUT BERUNGGOM NILU BUK JERENUN''



JERUNUN

SI ANTU DANUM



MENGENAL TOKOH *URBAN LEGEND* DARI KALTARA (BAGIAN 1)

[Penulis : Ida Ayu Parlina[1]]

Uy, Peradi!

Secara umum yang dimaksud dengan *urban legend* (legenda urban) adalah cerita rakyat yang mengandung unsur mistis, misteri, hal-hal yang mengerikan atau menyeramkan. Cerita legenda urban berkembang di masyarakat secara turun menurun. Meskipun tidak memiliki bukti yang kuat, namun tidak sedikit pula orang yang mempercayai bahwa cerita itu benar terjadi, karena adanya pengakuan dari orang-orang yang mengalami kejadian seperti dalam cerita legenda urban tersebut secara langsung, meskipun tidak bisa memberikan bukti secara kongkrit.

Dulu, cerita legenda urban hanya sebatas cerita dari mulut ke mulut, turun temurun dari generasi ke generasi. Menjadi cerita selingan saat orang-orang dewasa berkumpul atau menjadi bagian dari cerita pengantar tidur yang disampaikan oleh ibu kepada anak-anak dengan menyisipkan pesan-pesan moral, sekaligus sebagai siasat yang ampuh agar anak-anak segera memejamkan mata.

Jaman sekarang, cerita legenda urban menjadi salah satu jenis cerita yang populer, tidak hanya secara lisan tapi juga tulisan. Bahkan ketika cerita-cerita *urban legend* diangkat ke layar kaca atau layar perak, maka film-film tersebut meraup keuntungan yang besar, sebut saja film Kuntilanak, Jailangkung, dan Nenek Gayung. Tidak hanya Indonesia, negara-negara lain pun punya tokoh-tokoh seram dan kisah-kisah legenda urban yang membuat bulu kuduk berdiri, diantaranya seorang perempuan bernama Mae Nak dari Thailand yang menjadi hantu karena meninggal saat melahirkan.

Lalu ada Pontianak yaitu Kuntilanak versi Malaysia atau si Orang Minyak tokoh misteri dari Negeri Jiran lainnya yaitu seorang laki-laki yang mengamalkan ajaran sesat dan untuk mencapai tingkat kesaktian tertentu dia harus merudung paksa gadis-gadis perawan. Dari Jepang ada Hanako San, seorang hantu perempuan yang mendiami toilet.

Filipina pun punya tokoh legenda urban yang sadis, yaitu Maria Labo si perempuan kanibal, dan masih banyak lagi. Beda negara beda cerita. Cerita-cerita legenda urban tidak hanya dimiliki oleh daerah yang penduduknya kental dengan kepercayaan mistisnya seperti negeri Asia, tetapi negeri barat yang maju pun memiliki cerita-cerita *urban legend,* sebut diantaranya yang paling terkenal yaitu Vampire atau Dracula si penghisap darah manusia, lalu ada Werewolf si manusia serigala, ada Candiman si pembunuh berkekuatan supranatural yang akan muncul jika namanya disebut di depan cermin sebanyak lima kali!

Bagaimana dengan Kaltara, apakah punya kisah urban legend juga? Ada dong, selain figur horor yang sudah dikenal secara luas seperti Kuyang, ada pula hantu-hantu lokal lainnya yang tak kalah menyeramkan ikut meramaikan dunia perhantuan di Kaltara. Yuk, kenalan satu per satu!

Disclaimer: Tokoh legenda urban dipercaya merupakan hantu yang berasal dari bangsa jin yang durhaka (karena ada juga jin yang baik), mereka memiliki kemampuan berinteraksi dengan manusia dalam berbagai cara, baik berupa penampakan wujud yang jelas maupun secara samar atau berupa suara saja.

1. Jerenun

Nama Jerenun bagi masyarakat lokal adalah nama yang tidak asing lagi. Jerenun adalah hantu air (dalam bahasa Bulungan disebut antu danum) yang cukup populer. Tidak diketahui secara pasti penyebab Jerenun menjadi hantu penunggu perairan. Apakah sejak semula dia memang diciptakan sebagai penghuni sungai yang tidak berwujud ikan melainkan makhluk menyeramkan. Ataukah dulunya ia adalah manusia biasa yang meninggal dengan cara yang tragis, kemudian menjadi hantu yang bergentayangan di perairan. Tiada yang tau. *Nobody knows.*

Dalam sesuron atau dongeng Jerenun digambarkan sebagai makhluk yang bertubuh hitam dengan mata yang kemerahan seperti mata udang yang mulai membusuk. Konon Jerenun berkulit kasar berlumur lendir, namun jangan meremehkan kekuatan tubuhnya yang licin itu, karena sekali dia mencengkeram korbannya akan kesulitan meloloskan diri. Penggambaran wujud Jerenun berbeda-beda bagi setiap orang. Dari mulut para ibu, wujud Jerenun akan semakin seram ketika anak-anaknya semakin susah diatur.

Ada satu identitas Jerenun yang paling ikonik yaitu rambutnya yang ikal dan kusut. Begitu melekatnya ciri-ciri Antu Danum tersebut sampai-sampai ketika ada orang yang malas merawat rambutnya atau membiarkan rambutnya acak-acakan tidak disisir, maka dia dikatakan, "Buknya mencagut berunggom nilu buk Jerenun." (Rambutnya kusut masai awut-awutan seperti rambut Jerenun).

Beberapa orang pernah apes memiliki pengalaman dengan Jerenun, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Penulis pernah memosting sebuah



status *facebook* terkait eksistensi Jerenun dan mendapatkan respon yang beragam dari netizen. Ada beberapa orang yang membagikan pengalaman pribadinya melihat wujud Jerenun dan ada pula yang mengaku sampai mengalami kontak fisik dengannya.

Apa sebenarnya kejahatan utama Jerenun yang membuatnya ditakuti? Atau seperti apa modus operandinya? Dalam beberapa kisah yang melibatkan Jerenun, Jerenun suka mengganggu orang, bahkan ada cerita yang berujung pada maut akibat korban yang mati lemas. Namun, lebih banyak lagi kisah-kisah yang berakhir baik, artinya saat menyadari korban telah melihat wujudnya, Jerenun memilih menjauh seperti orang yang punya hutang tapi tak berniat membayar. Jadi, jika kamu bertemu Jerenun kemungkinan untuk selamat lebih besar, paling-paling juga trauma. Salah satu kisah Jerenun di bawah ini merupakan cerita fiksi yang berangkat dari cerita pengantar tidur masa kanak-kanak. Begini ceritanya...

Cerita mengambil tempat di Tanjung Palas pada akhir tahun 70-an, kala itu jumlah penduduk masih sedikit. Jarak antara satu rumah dan rumah lainnya masih jarang. Banyak rumah yang belum memiliki kamar mandi, sehingga aktivitas mencuci, mandi dan membuang hajat dilakukan di sungai pada satu tempat yang disebut Terunan. Terunan adalah dermaga yang terdiri dari jembatan yang menghubungkan tepi sungai dan rakit yang terbuat dari dua atau tiga batang kayu pengapung (bateng) berlantai papan. Terunan biasanya memiliki sebuah bilik kecil yang berfungsi sebagai kamar mandi sekaligus toilet yang disebut lanting. Satu terunan kadangkala digunakan bersama oleh dua atau tiga rumah tangga.

Suatu hari, waktu menunjukan pukul 12 siang. Udara terasa lebih panas dari biasanya. Seolah matahari bersinar tepat di atas kepala. Air sungai

jernih berkilauan, namun menyeruakkan bau amis. Di bawah sebatang pohon kelapa yang batangnya melengkung dan menjorok ke sungai, nampak seorang lelaki sedang berendam. Agaknya dia sedang mendinginkan tubuhnya atau sedang melakukan sesuatu. Dari kejauhan tidak terlihat jelas apa yang sedang dipegangnya.

Saat itu air sungai sedang surut, langas atau lumpur sungai di bagian tepi agak mengeras. Di situlah mereka bermain sambil sesekali berenang agak ke tengah bolak-balik antara tepi sungai dan bateng. Laki-laki dari bawah pohon kelapa melihat tingkah laku kedua anak tersebut dengan malas, asyik memainkan sebilah rotan panjang di tangannya.

air perlahan telah pasang. Langas yang di bawah kakinya menjadi lumpur yang membenamkan hingga di atas mata kaki. Ketika mencapai rungkop atau tepian yang berumput, dia dikagetkan oleh suara jeritan. Dia segera berbalik, namun dia tidak melihat temannya si pemilik suara, hanya riak air yang perlahan mereda.



Terunan tempo dulu dari koleksi foto jaman Hindia Belanda

Sementara itu, di tangga sebuah rumah nampak dua orang anak kecil mengendap-endap keluar menuju halaman. Keduanya menahan tawa gembira karena berhasil kabur dari kewajiban tidur siang. Mereka berbicara dengan berbisik-bisik agar tidak terdengar oleh ibu mereka yang sudah terlelap kelelahan. Setelah melewati pagar halaman yang berupa barisan bunga kaca piring, keduanya berlari riang menuju tepi sungai. Mulanya mereka hanya bermain-main saja.

Namun kilauan cahaya matahari yang terpantul di air menarik minat mereka. Ditambah pula cuaca yang panas membuat keduanya sepakat untuk berenang. Keduanya berjalan menuju air melalui tepian sungai.

Dia hanya mengawasi mereka dalam diam, meskipun pikirannya sangat berisik dengan berbagai pertanyaan. 'Mengapa anak-anak itu berada di luar rumah?', 'Kemana orang tua anak-anak itu?', 'Mengapa mereka dibiarkan berada di sungai saat sepi begini?' Dia menyerigai lalu meninggalkan tepian sungai.

Setelah puas bermain anak-anak menjadi lapar dan memutuskan untuk pulang. Keduanya berlomba menuju tepian sungai sambil tertawa riang. Namun tawa anak yang berada di belakang tiba-tiba terhenti ketika ia merasakan sesuatu menyetuh kakinya. Sesuatu yang dingin dan licin seperti lumut pada batang kayu. Anak yang berada depan sudah mencapai tepi sungai. Ternyata selama mereka bermain

Dipandangnya sekeliling, mencari dan memanggil nama temannya berulang kali, namun hanya semilir angin yang menghembus daun-daun kelapa yang menjawab seruannya itu. Keesokan harinya, jasad anak yang tenggelam itu berhasil ditemukan di bawah pohon kelapa yang menjorok ke air.

Pergelangan kakinya terbelit rotan yang tersangkut pada akar pohon kelapa. Cerita anak yang tenggelam dengan tubuh berlumur lendir yang berbau amis beredar cepat di masyarakat. Hal itu membuat para orang tua kembali menyebut nama Jerenun dalam sesuron mereka.

Next, cerita legenda urban kedua: Bilau (Bersambung).

[1] Pegiat Literasi

BAPPEDA DAN LITBANG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SELAMAT ATAS PENCAPAIAN



Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan
Opini WTP selama 11 Tahun berturut-turut oleh
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK

TEKA TEKI SILANG



Pertanyaan

Menurun :

1. Akronim dari kalimat Manajemen Intimung Sahabat Literasi
2. Salah satu prinsip perencanaan yang mengutamakan keselarasan antar level Pemerintah
3. Salah satu potensi alam Kaltara selain batu bara
4. Salah satu pilar Strategis Nasional Pencegahan Stunting

Mendatar :

5. Salah satu pelabuhan di Kabupaten Nunukan
6. Salah satu suku di Kaltara
7. Kurang asupan gizi terhadap anak
8. Singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Bandara di Tarakan
10. Air terjun yang berada di Kabupaten Malinau
11. Objek wisata air terjun di Kabupaten Tanah Tidung
12. Alat musik suku Dayak
13. Rumah adat suku Dayak

TTS Buletin Lensa Pembangunan, yuk ikuti !

- Tersedia hadiah menarik untuk 3 pemenang beruntung yang berhasil menyelesaikan TTS dengan benar
- Satu orang hanya bisa mengisi satu kali dalam satu edisi buletin
- TTS tidak berlaku untuk ASN Bappeda dan Litbang Kaltara beserta keluarga
- Telah mengikuti akun Instagram @Bappedalitbangkaltara
- Jawaban dikirim melalui DM Instagram Bappeda dan Litbang
- Pemenang akan diumumkan pada Instagram Bappeda dan Litbang
- Batas akhir pengiriman jawaban tanggal 20 September 2025

Telah Terbit

TOP 15 BUKU INOVASI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

"INOVASI KUAT, KALTARA HEBAT"



SCAN ME

DAPAT DIAKSES SECARA RESMI MELALUI
HTTPS://BAPPEDALITBANG.KALTARAPROV.GO.ID/

bappedalitbang_kaltara | bappedadanlitbangprov_kalimantanutara | bappeda&litbangprovkaltara | bappedalitbang_kaltaraprov.go.id